

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



PUSAT DATA DAN INFORMASI

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) ini selesai disusun.

LAKIP Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan hasil pencapaian atau kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022. Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Pasal 18, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan ini memberikan gambaran tentang pencapaian dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya tindak lanjut yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud dalam mendukung proses pengambilan keputusan selanjutnya.

Semoga laporan akuntabilitas ini dapat bermanfaat dalam melakukan berbagai langkah perbaikan dan akan digunakan sebagai bahan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 22 Februari 2023

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI


DIDI HAMZAR, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Pusdatin tahun 2022 merupakan laporan kinerja yang disusun secara berkala setiap tahunnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan ini dapat memberikan informasi hasil capaian kinerja serta berbagai upaya yang diambil sebagai langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

Pengukuran akuntabilitas kinerja pada laporan ini didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022. Dokumen perjanjian kinerja tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2020 – 2024, dimana di dalamnya terdapat Sasaran, Tujuan serta Indikator Kinerja setiap unit kerja di lingkungan Basarnas.

Capaian kinerja Pusdatin tahun 2022 yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja terdiri dari 3 sasaran dan 8 indikator kinerja. Enam indikator telah mencapai target sedangkan dua indikator lainnya belum mencapai target, yaitu (1) Capaian indikator “Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat” sebesar 92% dari target (target 100%, realisasi 91,67%); dan (2) Capaian indikator “Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional” sebesar 86% dari target (target 98%, realisasi 86%).

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian kinerja Pusdatin selama tahun 2022 telah berjalan dengan baik dan Pusdatin telah berusaha secara optimal guna memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Informasi.....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	4
1.4. Sumber Daya Pusat Data dan Informasi.....	6
1.4.1. Sumber Daya Manusia.....	6
1.4.2. Sumber Daya Anggaran.....	8
1.5. Permasalahan Utama.....	9
BAB II	11
PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi.....	11
2.2. Perjanjian Kinerja.....	21
2.3. Dialog Kinerja.....	22
2.4. <i>Cross Cutting</i> Sasaran Kinerja.....	22
BAB III	23
AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Prosedur Pengumpulan Data.....	23
3.2. Capaian Kinerja Pusat Data dan Informasi.....	23
3.3. Analisis Capaian Kinerja.....	25
3.4. Realisasi Anggaran.....	56
BAB IV	59
PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan.....	59
4.2. Kendala.....	59
4.3. Tindak Lanjut.....	60
LAMPIRAN	62
Tabel Dialog Kinerja.....	63
<i>Cross Cutting</i> Sasaran Kinerja.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. AKIP juga merupakan bentuk perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Bentuk sistem pertanggungjawaban yang dijadikan tolok ukur dalam menilai kinerja dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka melakukan pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sebagai salah satu unit kerja setingkat eselon II di Basarnas yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi serta memberikan pelayanan data dan informasi telah menyusun LAKIP Tahun 2022. LAKIP disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Pusdatin dalam mencapai sasaran strategisnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun, serta memberikan gambaran keberhasilan melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2022.

1.2. Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Informasi

Dengan adanya penataan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), berupa perubahan terhadap unit organisasi (Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Kerjasama, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum serta penambahan unit kerja Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan), maka dilakukan penyesuaian terhadap peraturan organisasi dan tata kerja di lingkungan Basarnas.

Namun demikian, meskipun dengan telah dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, susunan organisasi dan tata kerja unit kerja Pusdatin tidak mengalami perubahan, dan masih mengacu pada Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020, dimana dalam Bab VIII Bagian Kesatu disebutkan bahwa:

- Pasal 72, (1) Pusat Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 73, Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 74, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kelola data, informasi, dan teknologi informasi;
- b. pelaksanaan di bidang tata kelola data, informasi, dan teknologi informasi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola data, informasi, dan teknologi informasi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Data dan Informasi.

Sebagai salah satu unit penunjang di Basarnas, Pusdatin berperan strategis sebagai unit pengolahan data dan informasi serta pengelola teknologi informasi di lingkungan Basarnas. Peran Pusdatin dalam mengelola teknologi informasi mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), atau lebih dikenal dengan istilah *e-Government (electronic government)*.

Pelaksanaan SPBE merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya peningkatan kinerja di lingkungan Basarnas dan menjadi fokus perhatian Pusdatin terutama dalam mendukung reformasi birokrasi. Modernisasi budaya kerja juga terus dilaksanakan dalam mengoptimalkan cara kerja yang lebih maju, lebih efisien, lebih produktif dan lebih efektif, salah satunya adalah melalui transformasi digital dengan dukungan elektronik menuju tercapainya *Smart Governance*.

Di sisi lain, peran Pusdatin dalam melakukan pengolahan data dan informasi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Pusdatin sebagai walidata di instansi Basarnas memiliki kewenangan dalam mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data yang terdiri dari seluruh Unit Kerja Kantor Pusat, serta produsen data pendukung yang terdiri dari seluruh Unit Pelaksana

Teknis (UPT) di lingkungan Basarnas. Melalui penyelenggaraan SDI kedepannya pemerintah akan dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses, dan dibagipakaikan.

Pelaksanaan SPBE erat kaitannya dengan kebijakan SDI, dimana dalam Peraturan Presiden tentang SPBE tersebut diamanatkan bahwa SPBE mendukung pelaksanaan tata kelola data dalam Satu Data Indonesia dengan pemberian dukungan teknologi informasi baik melalui pembangunan atau pengembangan aplikasi maupun pembangunan infrastruktur teknologi informasi berbagi pakai yang dibutuhkan.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Bab VIII Bagian Kedua disebutkan bahwa:

Pasal 75, Susunan organisasi Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 76, Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran Pusat Data dan Informasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan keuangan, pelaksanaan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan serta pelaporan Pusat Data dan Informasi.

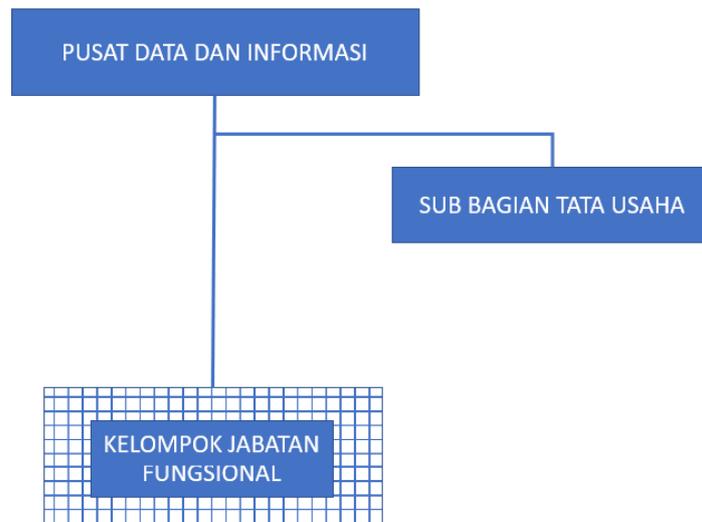
Sedangkan yang dimaksud dengan Kelompok Jabatan Fungsional pada Bab X yaitu:

Pasal 78, Di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan\.

- Pasal 79, (1) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala.
- Pasal 80, (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Kelompok jabatan fungsional yang ada di unit kerja Pusdatin berada langsung di bawah Kepala Pusat Data dan Informasi.

Berikut ini merupakan struktur organisasi Pusdatin

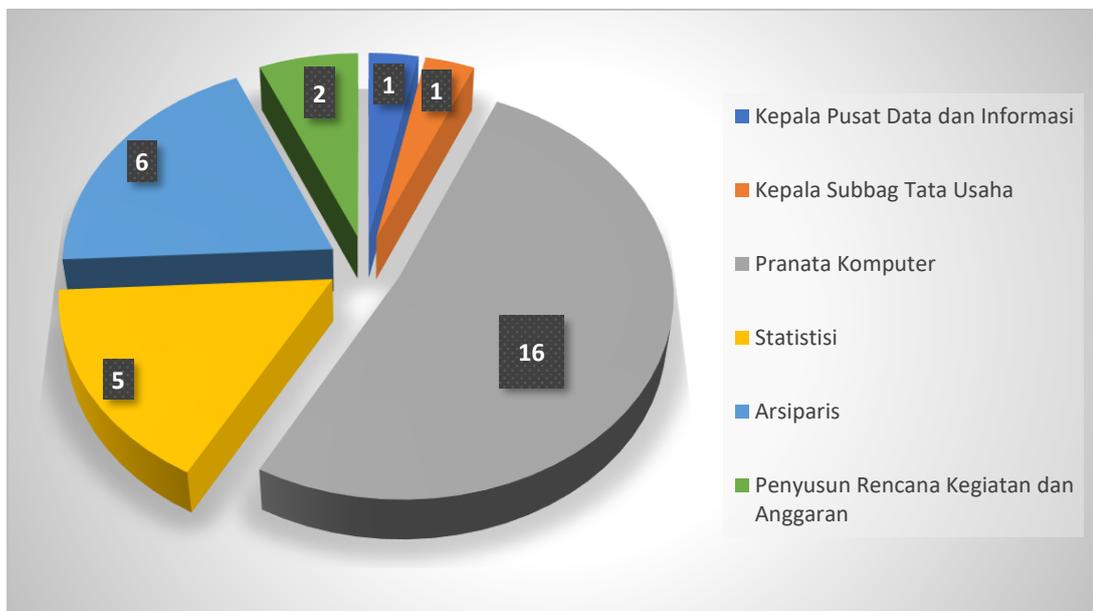


1.4. Sumber Daya Pusat Data dan Informasi

1.4.1. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pusdatin didukung oleh kekuatan sumber daya manusia sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, dengan perincian sebagai berikut

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan



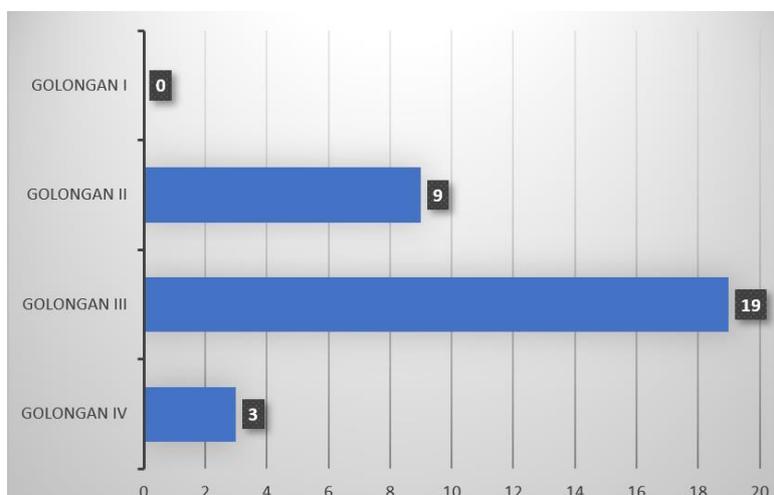
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki- Laki	Perempuan	
1.	Kepala Pusdatin	1	-	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	-	1	1
3.	Pranata Komputer	14	2	16
4.	Statistisi	2	3	5
5.	Arsiparis	2	4	6
6.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	-	2	2
	Total	19	12	31

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Jabatan	Pendidikan			Jumlah
		D3	S1	S2	
1.	Kepala Pusdatin	-	-	1	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	-	1	-	1
3.	Pranata Komputer	5	9	2	16
4.	Statistisi	1	3	1	5
5.	Arsiparis	5	1	-	6
6.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	-	2	-	2
	Total	11	16	4	31

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Sejalan dengan tugas dan fungsinya, Pusdatin juga telah membentuk tim penilai jabatan fungsional Pranata Komputer dalam upaya meningkatkan profesionalisme sumber daya manusianya terutama dalam pendayagunaan teknologi informasi yang dimilikinya.

1.4.2. Sumber Daya Anggaran

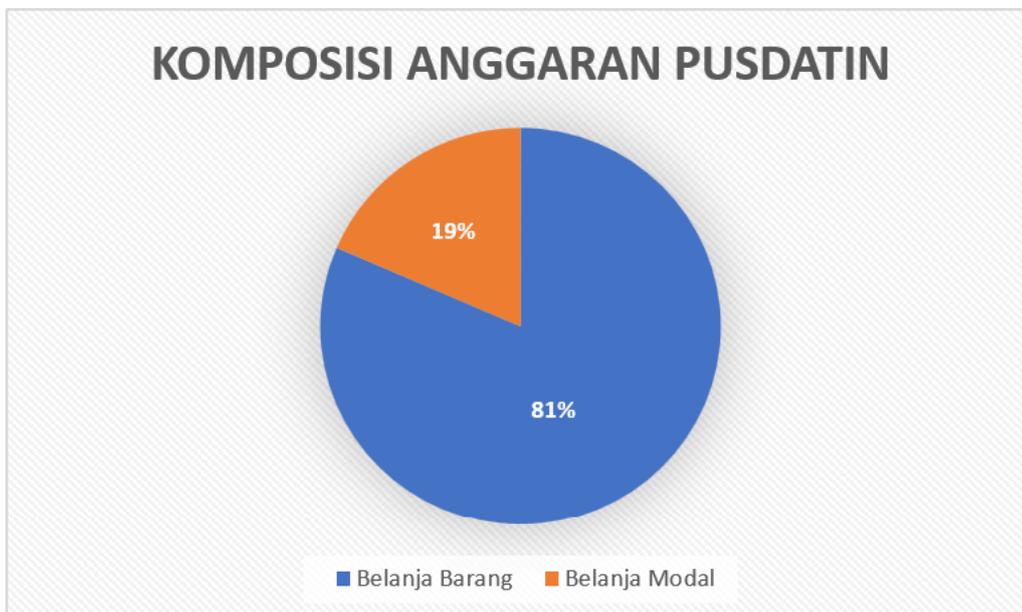
Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Basarnas Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-107.01-0/2022 tanggal 17 November 2021, anggaran yang dialokasikan untuk Pengelolaan Data dan Sistem Informasi adalah sebesar **Rp. 23.166.652.000,-**. Anggaran tersebut dipisahkan menjadi 2 (dua), alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi unit kerja Pusdatin adalah sebesar **Rp. 21.824.452.000,-** dan anggaran yang diperuntukkan bagi seluruh UPT dengan total nilai anggaran sebesar **Rp. 1.342.200.000,-**.

Pada tahun 2022, pemerintah melaksanakan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) di seluruh Kementerian/Lembaga. Untuk Pusdatin sendiri, dari alokasi anggaran yang dimiliki sebesar **Rp. 21.824.452.000,-** (dua puluh satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), telah dilakukan 2 (dua) kali *automatic adjustment*, dengan total nilai blokir sebesar **Rp. 663.119.000,-** (enam ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sehubungan dengan mitigasi dampak berlanjutnya pandemi Covid-19, maka pemerintah melakukan *automatic adjustment* pertama pada akhir tahun 2021 dengan alokasi sebesar **Rp. 407.663.000,-** (empat ratus tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), maka pagu anggaran Pusdatin menjadi sebesar **Rp. 21.416.789.000,-** (dua puluh satu milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- b. Dalam rangka Kebijakan Antisipatif APBN untuk Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli Masyarakat, dan Kesehatan APBN, maka dilakukan *automatic adjustment* yang kedua, yaitu pada akhir bulan Mei tahun 2022. Nilai anggaran Pusdatin yang terkena blokir adalah sebesar **Rp. 255.456.000,-** (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh

enam ribu rupiah). Maka alokasi anggaran terakhir yang dimiliki Pusdatin menjadi sebesar **Rp. 21.161.333.000,-** (dua puluh satu milyar seratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Perincian dari nilai terakhir alokasi anggaran Pusdatin **Rp. 21.161.333.000,-** (dua puluh satu milyar seratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) meliputi: a) Belanja Barang sebesar **Rp. 17.244.681.000,-** dan b) Belanja Modal sebesar **Rp. 3.916.652.000,-**



1.5. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pusdatin dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Tata kelola dan tata laksana SPBE dan SDI Pusdatin Basarnas belum optimal disebabkan tingginya dinamika kebijakan nasional dan banyaknya indikator SPBE dan SDI yang terus bertambah dan tidak berimbang dengan ketersediaan sumber daya pengembangan infrastruktur dan aplikasi dalam menunjang layanan pencarian dan pertolongan khususnya dalam kemudahan akses dan berbagi pakai.

2. Belum optimalnya **penggunaan layanan** infrastruktur dan aplikasi oleh *user* disebabkan terbatasnya sumber daya teknologi informasi dan data di Unit Kerja Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Basarnas.
3. Belum optimalnya layanan infrastruktur, aplikasi, dan data oleh Pusdatin selaku **penyedia layanan** disebabkan terbatasnya kompetensi SDM dihadapkan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.
4. Tata kelola dan tata laksana infrastruktur khususnya data center dan optimalisasi jaringan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) berhadapan dengan situasi umur perangkat (*lifetime*), dan berakhirnya produk dan layanan perangkat (*end of services*).
5. Tuntutan transformasi IT dan digital melayani dalam kemudahan akses, integrasi, dan interoperabilitas menuju Satu Data Indonesia oleh Bappenas, Pusat Data Nasional, dan lainnya dibutuhkan kegiatan yang sinergi dan kolaborasi secara konsisten, bertahap dan terjadwal dalam tata kelola dan tata laksana data.
6. Adanya refocussing/ automatic adjustment anggaran dari pemerintah berdampak pada menurunnya kualitas program-program prioritas dalam peningkatan tata Kelola dan tata laksana menuju transformasi smart government SPBE dan SDI di Basarnas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP dimulai dari perencanaan kinerja (jangka panjang, menengah dan pendek), penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

2.1. Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi

Penyusunan rencana strategis setiap organisasi tidak akan terlepas dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi.

a. Visi

Sebagai bentuk dukungan Pusdatin dalam mewujudkan visi dan misi organisasi Basarnas 2020 – 2024, maka Pusdatin telah memiliki visi untuk periode 2020 – 2024. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, berdasarkan hal tersebut visi Pusdatin sendiri merupakan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Pusdatin kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdatin sebagaimana diatur melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Visi Pusdatin adalah **“Menjadikan data sebagai sumber informasi yang lengkap, akurat dan terpercaya untuk mendukung pengembangan dan keberhasilan aktivitas SAR”**.

Visi Pusdatin merupakan komitmen Pusdatin untuk memberikan data yang akurat dan terpercaya sebagai salah satu sumber informasi.

b. Misi

Misi merupakan sebuah gambaran umum yang menjelaskan mengenai siapa dan apa peranannya, apa yang akan dilakukan serta tujuan secara umum yang akan dicapai. Sejalan dengan visi yang telah ada, Pusdatin juga menetapkan Misi yang berkaitan dengan upaya pencapaian visi tersebut. Misi Pusdatin adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan metodologi dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi;
- c. Membina sumber daya manusia dan kelembagaan bidang statistik dan sistem informasi.

c. Tujuan

Dengan memperhatikan tujuan Basarnas yang telah tertuang dalam Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 – 2024, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/ jenis tujuan, yaitu sebagai berikut:

- TN Memperkuat pelayanan dasar keselamatan dan keamanan transportasi nasional
- TS.1 Terselenggaranya layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan professional.
- TS.2 Terselenggaranya keandalan sumber daya dan kualitas lembaga pencarian dan pertolongan
- TP.1 Terselenggaranya peningkatkan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan
- TP.2 Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional
- TP.3 Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal
- TP.4 Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas
- TP.5 Terwujudnya regulasi dan kelembagaan yang berkualitas

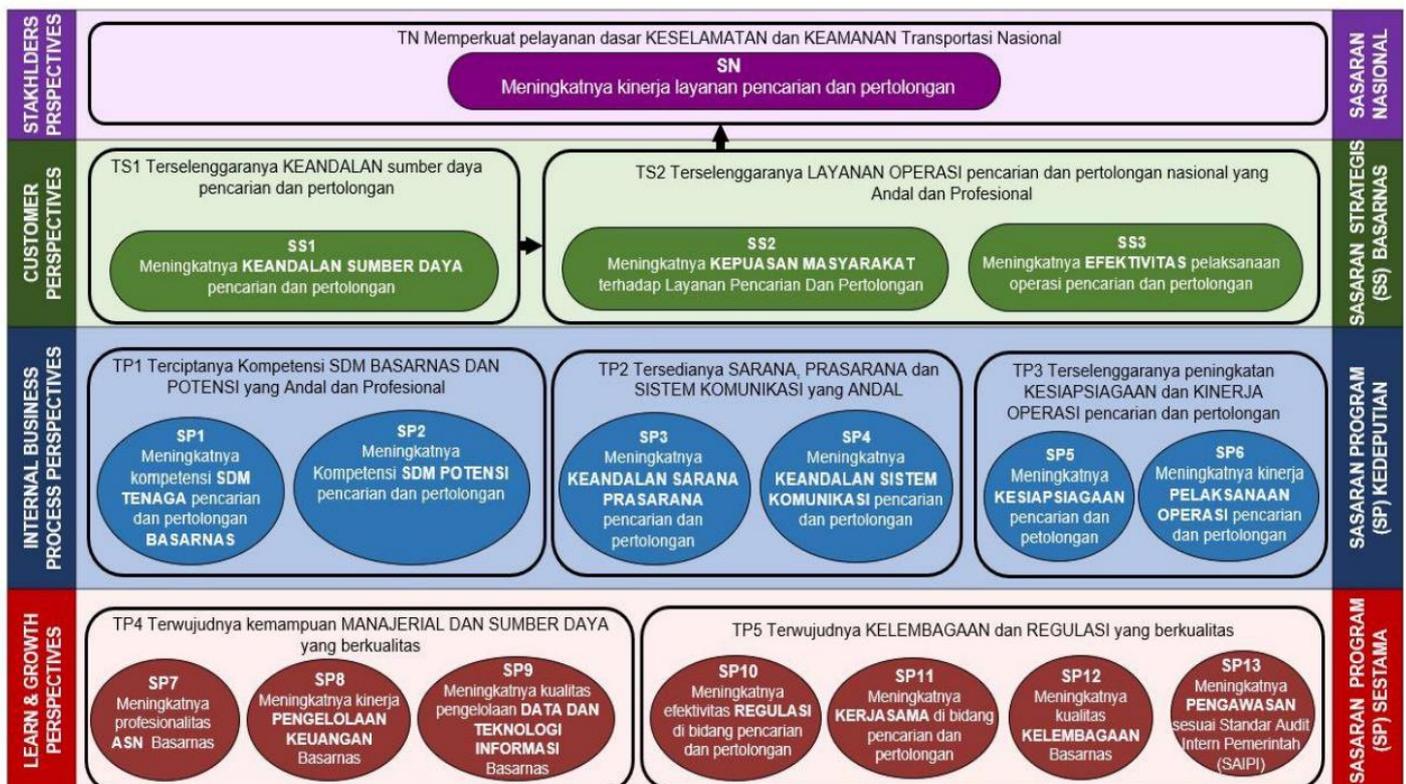
Sekretaris Utama sebagai unit Eselon 1 yang melaksanakan program-programnya memiliki suatu tujuan yang merupakan Tujuan Program (TP) yang tertuang pada TP. 4 dan TP. 5. Tujuan Program tersebut diupayakan pencapaiannya dalam rangka mendukung Tujuan Strategis Basarnas. Untuk unit kerja Pusdatin sebagai unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Basarnas melalui Sekretaris Utama mendukung pencapaian tersebut dengan tujuan sesuai TP.4 yaitu Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas.

d. Sasaran Program

Berdasarkan tujuan program yang telah ditetapkan tersebut, Pusdatin memiliki Sasaran Program 9 (SP.9) untuk perspektif *Learning and Growth* (LGP) yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Peta Strategis Basarnas Tahun 2020 - 2024

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Tabel berikut adalah tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Pusdatin berdasarkan dokumen Renstra Basarnas tahun 2020 – 2024 tersebut

Tujuan, Sasaran, dan Target Indikator Kinerja Pusdatin dalam Renstra Basarnas Tahun 2020 - 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	Tersedianya data dan informasi yang akurat	1. Persentase ketersediaan data pada unit dan satuan kerja Basarnas yang dikirim tepat waktu	75%	75%	80%	80%	85%
		2. Persentase kepuasan masyarakat melalui polling atas data dan informasi yang terdapat pada website Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	70%	70%	75%	75%	80%
		3. Persentase penyajian data statistik pencarian dan pertolongan	60%	60%	70%	70%	80%
		4. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		5. Persentase paket pekerjaan yang menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	75%	75%	80%	80%	85%
		6. Persentase pelaksanaan ketatausahaan	83%	83%	85%	85%	88%
		7. Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi untuk pertukaran data dan informasi	50%	60%	70%	80%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		8. Persentase terpenuhinya SDM yang kompeten mengoperasikan aplikasi sistem informasi	70%	75%	80%	85%	90%
		9. Persentase sistem informasi yang telah dioperasikan sesuai SOP	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi	10. Persentase pembangunan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi	28%	50%	75%	88%	100%
	Pencarian dan Pertolongan	11. Persentase pengembangan dan pengintegrasian aplikasi sistem informasi	80%	82%	83%	85%	87%
	Meningkatkan keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan	12. Persentase pemutakhiran data inventarisasi peralatan teknologi informasi	98%	98%	98%	98%	98%
		13. Persentase kesiapan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi dalam mendukung kegiatan operasional	98%	98%	98%	98%	98%

Pada tahun 2022, Pusdatin mereviu indikator kinerja dengan mengacu pada surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/22/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, yaitu melakukan perbaikan atas Indikator Kinerja pada Unit Kerja yang belum memenuhi kriteria Indikator Kinerja yang baik, maupun yang belum cukup untuk menggambarkan kinerja yang diharapkan pada Unit Kerja tersebut.

Untuk melakukan reviu terhadap indikator tersebut, Pusdatin juga telah melakukan peninjauan ulang kembali terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pusdatin tahun 2020 – 2024. Reviu yang dimaksud meliputi perubahan terhadap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan serta target kinerja unit kerja Pusdatin. Dalam dokumen reviu Renstra tersebut, Indikator Kinerja Pusdatin beserta target yang ingin dicapai mengalami perubahan, yaitu dari 13 indikator kinerja menjadi 8 indikator kinerja. Perubahan terhadap indikator kinerja tersebut merupakan hasil analisa dan rekomendasi dari evaluasi Laporan Kinerja yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Berikut ini merupakan hasil perubahan tersebut.

Perubahan Tujuan, Sasaran, dan Target Indikator Kinerja Pusdatin Tahun 2020 - 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	Tersedianya data dan informasi yang akurat	1. Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	N/A	N/A	100%	100%	100%
		2. Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	N/A	N/A	100%	100%	100%
		3. Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Cukup Informatif (60)	Cukup Informatif (60)	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (80)
	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk	4. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	Baik (2,6)	Baik (2,6)	Baik (2,6)	Baik (2,6)	Baik (2,6)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	mendukung operasi pencarian dan pertolongan	Elektronik (SPBE) Basarnas					
		5. Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	98%	98%	98%	98%	98%
	6. Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	50%	60%	70%	80%	90%	
	Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin	7. Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	83%	83%	85%	85%	88%
		8. Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	70%	75%	80%	85%	90%

Penjelasan dan rumus perhitungan indikator kinerja berdasarkan pada Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 – 2024, adalah sebagai berikut

Penjelasan dan Rumusan Perhitungan Indikator Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumusan Perhitungan
SK. 9.1.1	Tersedianya data dan informasi yang akurat		
	IKSK.9.1.1.a Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	%	Mengukur persentase pemenuhan data berdasarkan hasil kesepakatan forum satu data yang akan dikumpulkan pada tahun berjalan untuk penyajian dalam bentuk buku statistik dan buku infografis. $A \% = \frac{\text{Jumlah Data yang terealisasi berdasarkan hasil kesepakatan}}{\text{Jumlah data yang disepakati dalam forum satu data}} * 100$ $B \% = \frac{\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yang teralisasi}}{\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yang diterbitkan per tahun}} * 100$ $\% = \frac{(\Sigma A\% + \Sigma B\%)}{2} * 100$
	IKSK.9.1.1.b Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	%	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Basarnas (operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan potensi SAR, registrasi radio beacon) melalui survei dengan hasil nilai indeks $\% = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas yang terealisasi}}{\text{Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas dalam tahun berjalan}} * 100$
	IKSK.9.1.1.c Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	Mengukur hasil penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluator Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat, dengan kategori: Skor 97-100 = Informatif Skor 80-96 = Menuju Informatif Skor 60-79 = Cukup Informatif Skor 40-59 = Kurang Informatif Skor < 39 = Tidak Informatif
SK. 9.2.1	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan		
	IKSK.9.2.1.a Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	%	Mengukur hasil penilaian Sistem Informasi Berbasis Elektronik berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluator Eksternal dari Kementerian PANRB, dengan predikat penilaian: Memuaskan : 4.2 - 5.0 Sangat Baik : 3.5 - < 4.2 Baik : 2.6 - < 3.5 Cukup : 1.8 - < 2.6 Kurang : < 1.8
	IKSK.9.2.1.b Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	%	Mengukur persentase kesiapan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi selama setahun dalam mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik $A \% = \frac{\text{Total jam selama setahun - total downtime aplikasi}}{(365 \text{ hari} * 24 \text{ jam})} * 100$ $B \% = \frac{\text{Total jam selama setahun - total downtime infrastruktur}}{(365 \text{ hari} * 24 \text{ jam})} * 100$ $C \% = \frac{\text{Total jam selama setahun - total downtime internet}}{(365 \text{ hari} * 24 \text{ jam})} * 100$ $\% = \frac{(\Sigma A\% + \Sigma B\% + \Sigma C\%)}{3} * 100$
	IKSK.9.2.1.c Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	%	Mengukur persentase pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional $\% = \frac{\text{jumlah pelaksanaan dukungan teknologi informasi dalam setahun}}{\text{total kegiatan Basarnas terkait dukungan TI yang direncanakan dalam setahun}} * 100$
SK. 9.3.1	Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin		
	IKSK.9.3.1.a Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	%	Mengukur persentase pelaksanaan ketatausahaan selama 1 (satu) tahun $A \% = \frac{\text{jumlah realisasi penverapan anggaran}}{\text{jumlah anggaran yang diterima}} * 100$ $B \% = \frac{\text{jumlah penggunaan arsip}}{\text{jumlah berkas}} * 100$ $\% = \frac{(\Sigma A\% + \Sigma B\%)}{2} * 100$
	IKSK.9.3.1.b Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	%	Mengukur persentase pemenuhan kompetensi SDM yang tersertifikasi $\% = \frac{\text{Jumlah SDM yang tersertifikasi}}{\text{Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi tahun berjalan}} * 100$

e. Arah Kebijakan

Untuk arah kebijakan Pusdatin dengan mengacu pada arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Reviu Renstra Pusdatin tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan infrastruktur teknologi informasi seperti penambahan perangkat teknologi informasi dan sistem jaringan di lingkungan Basarnas dan fasilitas pusat data yang aman (*secured network*);
- 2) Pengembangan sistem informasi dengan prinsip keamanan, interoperabilitas dan *cost effective* untuk mempercepat implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
- 3) Pemeliharaan infrastruktur, aplikasi, jaringan, data dan informasi untuk mendukung penerapan SPBE dan Satu Data Indonesia;
- 4) Penyediaan data dan informasi pencarian dan pertolongan yang akurat;
- 5) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- 6) Penguatan kebijakan dan regulasi mengenai Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi, serta prosedur layanan teknologi informasi dan layanan data informasi;
- 7) Penambahan alokasi anggaran untuk pengolahan data, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi informasi serta pengembangan kompetensi SDM.
- 8) Peningkatan kualitas layanan bidang ketatausahaan.

f. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Pusdatin sebagai unit kerja di Basarnas yang memberikan dukungan dan kontribusi dalam pencapaian program yang tertuang pada Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2020 – 2024, maka Pusdatin melaksanakan **Program generik** yaitu **Program Dukungan Manajemen**, dengan sasaran kegiatan **Pengelolaan Data dan Sistem Informasi**.

Kegiatan Pusdatin Tahun 2022 pada Program Dukungan Manajemen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	Volume
1	Tersedianya data dan informasi yang akurat	1. Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan	1 Dok
			Pengelolaan Data dan Statistik SAR	1 Dok
		2. Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	Pengelolaan Survey Kepuasan Layanan Basarnas	1 Dok
		3. Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Basarnas	1 Dok
2	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan	4. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Pengelolaan SPBE	1 Dok
			5. Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	Maintenance IT System Support
		Operasional Jaringan IT		1 Dok
		Pemeliharaan Data Maritim		1 Dok
		Pembayaran Lisensi Aplikasi		1 Dok
		Langganan Operasional Domain Basarnas		1 Dok
		IT Technical Support		1 Dok
		6. Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	Pengembangan Visualisasi Kolaborasi Streaming	1 Dok
Pengembangan Aplikasi Manajemen Informasi	1 Dok			
3	Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin	7. Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	Pengelolaan Anggaran dan Kearsipan	1 Dok
		8. Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	Pembinaan Kompetensi SDM TI	1 Dok

2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, maka Pusdatin telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi selaku pemberi amanah kepada pimpinan yang lebih rendah selaku penerima amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Pusdatin untuk tahun 2022

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya data dan informasi yang akurat	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	100%
		Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	100%
		Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)
2.	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Baik (2,6)
		Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	98%
		Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	70%
3.	Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	85%
		Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	80%

2.3. Dialog Kinerja

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi harus memiliki keselarasan antara kinerja organisasi dan kinerja individu. Disitulah pentingnya intensitas dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai yang dilibatkan sejak tahap perencanaan agar pegawai tahu tujuan dan apa yang harus diselesaikan. Pimpinan dan pegawai melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi.

Dialog kinerja yang dimaksud bukan sekedar pertemuan Pimpinan dengan Pegawai tetapi lebih menekankan pada komunikasi antara pimpinan dan bawahan untuk menyelaraskan kinerja yang dilakukan secara insidentil, intensif, terstruktur, berkelanjutan dan direncanakan sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja individu dan organisasi. Untuk itu, Pimpinan harus mampu menumbuhkan keterikatan dengan Pegawainya. Dialog kinerja menjadi kunci utama dalam pengelolaan kinerja pegawai. Tabel dialog kinerja Pusdatin dapat dilihat pada lampiran LAKIP.

2.4. *Cross Cutting* Sasaran Kinerja

Dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) seluruh instansi pemerintah difokuskan pada pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala. Implementasi dari efektifitas dan efisiensi anggaran tersebut adalah dalam bentuk *cross cutting*. Pengertian *cross cutting* disini adalah perencanaan yang saling terintegrasi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sinergitas dan kolaborasi baik antar unit kerja (internal) maupun antar instansi (eksternal). Saat ini *cross cutting* sasaran kinerja Pusdatin telah berjalan, dengan manfaat hasil (*outcome*) dari penerapan program kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pusdatin telah mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Gambar *cross cutting* Pusdatin dapat dilihat pada lampiran LAKIP.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah awal yang dilakukan dalam rangka mendukung proses perhitungan capaian kinerja adalah dengan melaksanakan pengumpulan data yang terkait dengan kinerja Pusdatin dan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam proses analisis kinerja. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, ataupun pemantauan terhadap hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak yang terlibat, baik itu unit kerja di lingkungan Basarnas maupun masyarakat luas sebagai sumber data. Proses analisa data kinerja sangat bergantung terhadap ketersediaan data dan informasi yang handal, relevan, akurat, dan lengkap. Dengan adanya dinamika kondisi lingkungan yang selalu mengalami perubahan, tidak menutup kemungkinan terdapat adanya perubahan data capaian kinerja. Oleh sebab itu dapat dilakukan koreksi untuk memperbaiki data kinerja sesuai dengan perkembangan capaian dan realisasi.

3.2. Capaian Kinerja Pusat Data dan Informasi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dari setiap indikator kinerja dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PERSENTASE CAPAIAN} = \frac{\text{REALISASI KINERJA}}{\text{TARGET KINERJA}} \times 100\%$$

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Mengacu pada Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 – 2024, maka capaian kinerja Pusdatin tahun 2022 diukur dari 3 sasaran dan 8 indikator kinerja. Berikut ini merupakan gambaran singkat capaian sasaran Pusdatin

Capaian Kinerja Pusdatin Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tersedianya data dan informasi yang akurat	1. Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	100%	100%	100%
	2. Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	100%	91,67%	92%
	3. Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,37)	112%
Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan	4. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Baik (2,6)	Baik (2,85)	110%
	5. Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	98%	84%	86%
	6. Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	70%	98%	140%
Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin	7. Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	85%	90%	106%
	8. Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	80%	100%	118%

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui apakah pencapaian hasil kinerja telah sesuai dengan target yang diharapkan atau justru menemui kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang ditemui tersebut dapat dipelajari dan dianalisa guna perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Seluruh proses analisis ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi setiap indikator yang ada untuk menilai sejauh mana pencapaian hasil kinerja dari target yang telah ditetapkan.

Pada Perjanjian Kinerja Pusdatin tahun 2022, terdapat 8 indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari 8 indikator kinerja tersebut, 6 indikator kinerja telah mencapai target. Berdasarkan hasil capaian kinerja sebagaimana telah digambarkan pada tabel tersebut di atas, berikut ini akan dijelaskan analisa capaian kinerja yang dilakukan dalam rangka memenuhi target dari setiap indikator kinerja tersebut.

A. Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya data dan informasi yang akurat

Sasaran kegiatan tersedianya data dan informasi yang akurat diukur dengan indikator:

1. Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data
2. Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat
3. Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Capaian indikator kinerja Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya data dan informasi yang akurat	1. Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	100%	100%	100%
	2. Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	100%	91,67%	92%
	3. Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,37)	112%

Tabel Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran kegiatan 1 tahun 2022 dengan tahun 2020 dan tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	2020	N/A	N/A	N/A
	2021	N/A	N/A	N/A
	2022	100%	100%	100%
2. Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	2020	N/A	N/A	N/A
	2021	N/A	N/A	N/A
	2022	100%	91,67%	92%
3. Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2020	Cukup Informatif (60)	Tidak Informatif (15,20)	25%
	2021	Cukup Informatif (60)	Menuju Informatif (89,90)	150%
	2022	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,37)	112%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

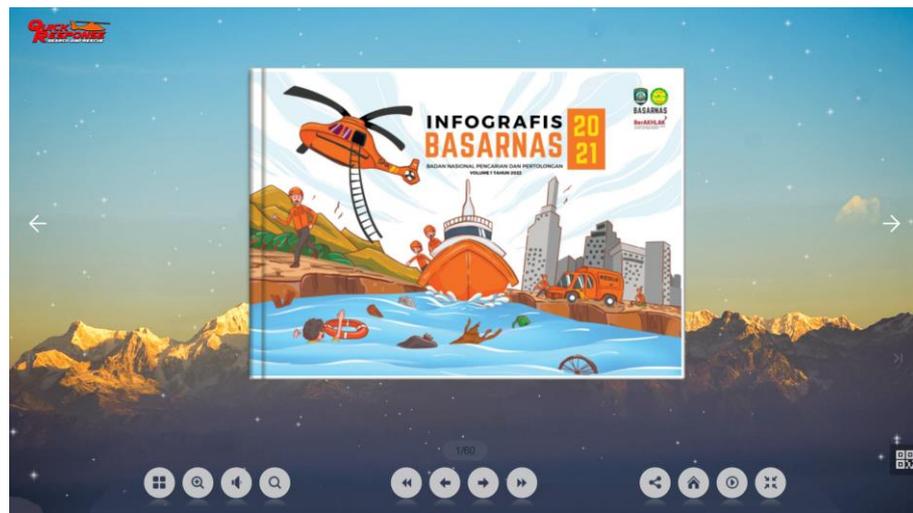
1. Indikator kinerja **Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data**

Pengukuran pada indikator kinerja ini adalah dengan melakukan pemantauan dan pengumpulan terhadap jumlah data yang diterima oleh Pusdatin selaku unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan data. Dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya tersebut, Pusdatin juga mempedomani Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Implementasi dari peraturan tersebut adalah Basarnas telah melakukan langkah tindak lanjut dengan menerbitkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan.

Mengacu pada peraturan tersebut, setiap data yang dimiliki harus memenuhi prinsip satu data yaitu standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi. Pusdatin sebagai wali data di lingkungan Basarnas berusaha untuk memenuhi kriteria tersebut yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Data yang saat ini dikumpulkan dan diolah secara rutin setiap bulannya berjumlah 11 (sebelas) data yang berasal dari produsen data (unit kerja yang memiliki data atau penghasil data), meliputi:

- a) Data operasi pencarian dan pertolongan (sumber data dari Direktorat Operasi);
- b) Data Sarana SAR udara, laut dan darat (sumber data dari Direktorat Sarana dan Prasarana);
- c) Data alat komunikasi (sumber data dari Direktorat Komunikasi);
- d) Data kepegawaian (berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jabatan) (sumber data dari Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana);
- e) Data anggaran, meliputi pagu, realisasi, dan prosentase anggaran total, pagu, realisasi, dan prosentase berdasarkan belanja pegawai dan belanja modal (sumber data dari Biro Perencanaan dan Keuangan);
- f) Data Latihan SAR (Sumber data dari Direktorat Kesiapsiagaan);
- g) Data Kerjasama dalam negeri dan luar negeri (sumber data dari Biro Hukum dan Kerjasama);
- h) Data pendidikan dan pelatihan tenaga (sumber data dari Direktorat Bina Tenaga);
- i) Data pelatihan potensi SAR (sumber data dari Direktorat Bina Potensi);
- j) Data produk hukum (sumber data dari Biro Hukum dan Kerjasama);
- k) Data sistem informasi, meliputi infrastruktur dan aplikasi sistem informasi (sumber data dari Pusat Data dan Informasi).

Data kemudian diolah menjadi data statistik (hasil keluaran berupa buku statistik) dan disajikan dalam bentuk infografis sehingga lebih mudah disampaikan kepada pihak yang membutuhkan informasi. Kendala yang dihadapi dalam membuat infografis tersebut adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang desain grafis, sehingga data yang disajikan terbatas. Berikut ini merupakan tautan Infografis mengenai instansi Basarnas tersebut <https://ppid.basarnas.go.id/flipbook/INFOGRAFIS%202021/index.html>



Dan untuk tautan data dan informasi statistik dapat diakses melalui <https://ppid.basarnas.go.id/flipbook/STATISTIK%202021/index.html>



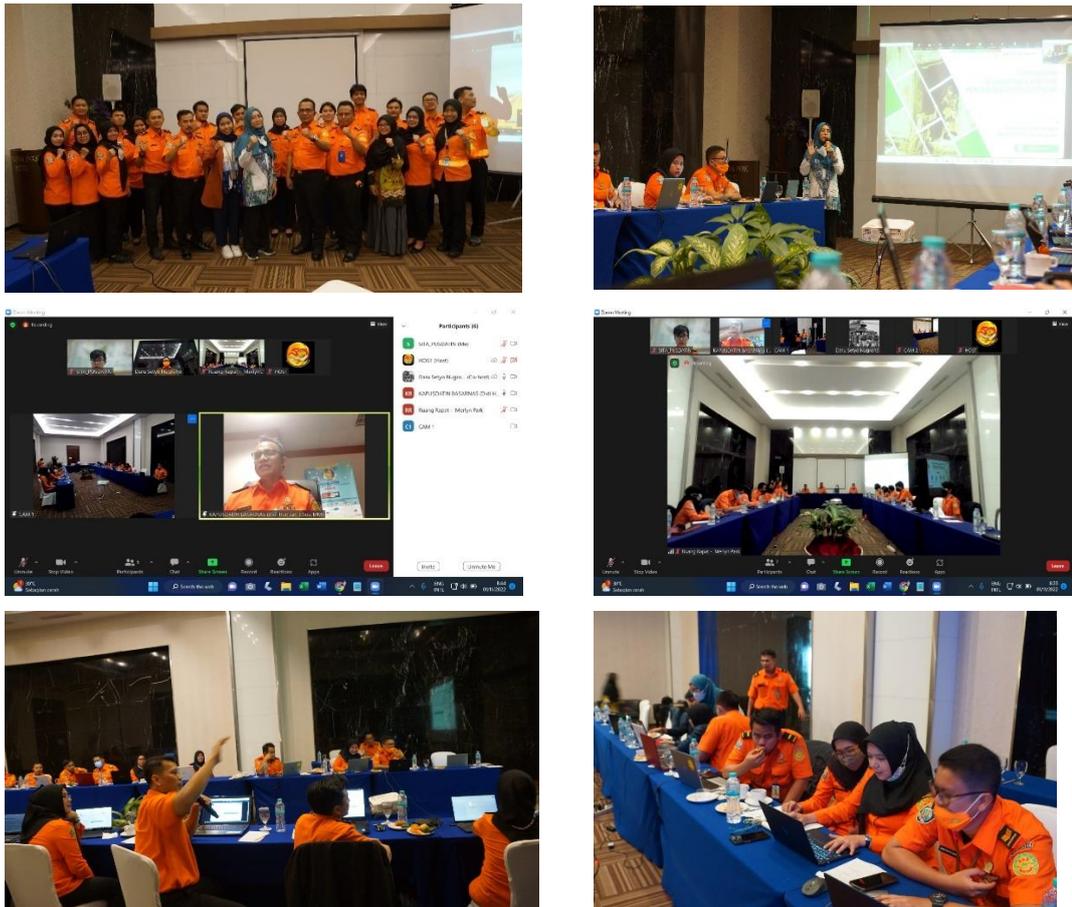
Berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator kinerja **persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan forum satu data**, didapatkan realisasi kinerja sebesar 100% dari target 100%, dengan demikian capaian indikator kinerja didapat 100%. Hal ini menandakan bahwa Pusdatin telah melaksanakan kegiatan ini dengan sangat baik. Harapan kedepannya Pusdatin selain berencana untuk merekrut pegawai dengan kemampuan dibidang desain grafis.

Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran tersedianya data dan informasi yang akurat adalah:

- Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan
- Pengelolaan Data dan Statistik SAR

Pada tahun 2022 kedua kegiatan tersebut diatas mengalami *automatic adjustment*, sehingga pembentukan forum satu data belum dapat dilaksanakan, namun dari hasil analisa sumber daya, meskipun kegiatan tersebut terkena blokir, Pusdatin telah melakukan berbagai upaya atas efisiensi penggunaan sumber daya, antara lain melaksanakan kegiatan sinkronisasi data yang dilakukan setiap bulan secara daring dan menyiapkan interoperabilitas data yang akan dibagipakaikan dalam portal satu data untuk menjamin kemudahan akses oleh seluruh pihak melalui tautan <https://data.go.id/home>.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia tersebut maka diadakan perubahan dari rencana awal kegiatan forum satu data menjadi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Standar Data. Kegiatan Bimtek tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 November 2022 bertempat di Merlyn Park Hotel – Jakarta dengan mengundang narasumber dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS) dan diikuti oleh 25 orang peserta (22 orang peserta dari Pusdatin dan 3 orang peserta dari BPS).



2. Indikator kinerja **Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat**

Pengukuran pada indikator kinerja ini adalah dengan menghitung data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh unit pelayanan Basarnas. Survei atau pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Basarnas dilaksanakan secara berkala (setiap triwulan) pada 3 (tiga) unit pelayanan, yaitu Operasi Pencarian dan Pertolongan (Direktorat Operasi), Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Direktorat Bina Potensi), dan Registrasi Alat Pemancar Sinyal Marabahaya (Direktorat Sistem Komunikasi).

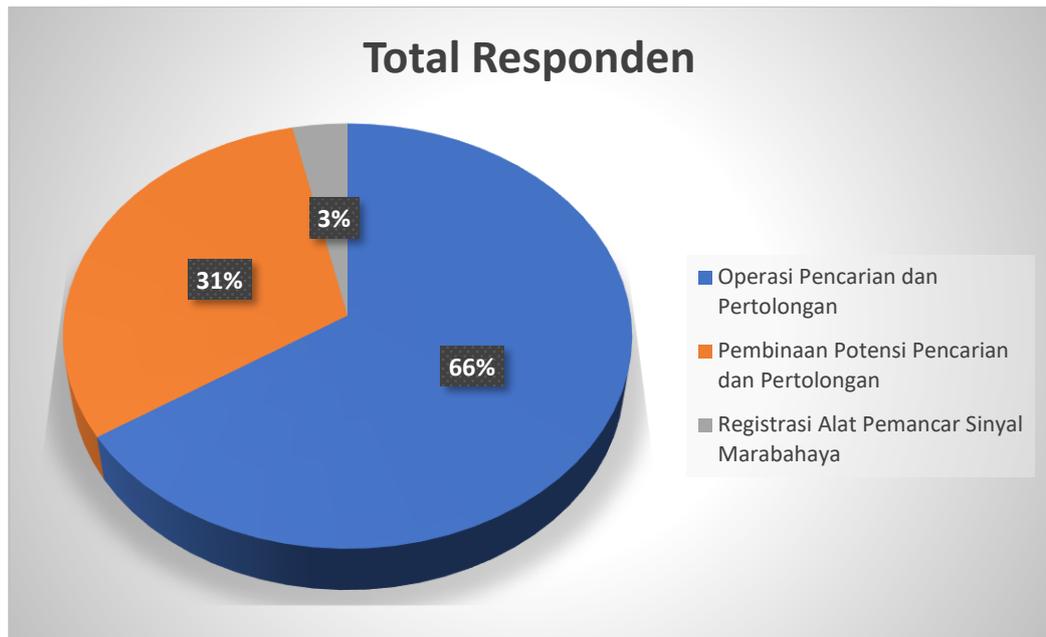
Kegiatan survei dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pencarian dan pertolongan yang diselenggarakan oleh Basarnas selaku badan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat selaku pengguna layanan publik yang semakin meningkat.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut, maka diperlukan suatu alat (*tools*) standar untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan. Hasil data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Basarnas melaksanakan kegiatan survei dengan menyebarkan kuesioner berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Hasil jawaban responden tersebut diolah menjadi angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik dan sebagai data pendukung dipakai data kualitatif, kemudian dijabarkan secara deskriptif. Seluruh kuesioner yang terkumpul diolah datanya dan dilakukan perhitungan oleh Pusdatin, kemudian hasil nilai perhitungan survei diserahkan kembali kepada unit penyelenggara layanan sebagai bahan evaluasi pimpinan terhadap kinerja pelayanan publik yang diberikan.

Total survei kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan Basarnas selama tahun 2022 adalah sebanyak 12 kali dengan total responden sebanyak 3330 orang, dengan perincian sebagai berikut

Unit Pelayanan	Jumlah Responden Survei Per Triwulan				Total Responden
	I	II	III	IV	
1. Operasi Pencarian dan Pertolongan	534	484	500	673	2191
2. Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	647	229	84	65	1025
3. Registrasi Alat Pemancar Sinyal Marabahaya	28	31	29	26	114
Total	1209	744	613	764	3330



Indikator kinerja **persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat** merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak ada pembanding tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap data survei yang diolah didapatkan realisasi sebesar 91,67% dari target 100%, maka diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 92%.

3. Indikator kinerja **Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**

Pengukuran kinerja ini adalah dengan memenuhi semua indikator penilaian yang ada dalam kuesioner [E-Monev Komisi Informasi Pusat](#). Kegiatan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat ini untuk melihat ketaatan dan kepatuhan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh seluruh badan publik serta menghimpun data dasar penyusunan data digital tentang peta KIP di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Adanya perlindungan dan jaminan dari Undang-undang diharapkan bisa memberi ruang yang lebih lebar kepada masyarakat untuk mendapatkan

informasi yang benar dan akurat. Secara prinsipnya, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Dengan begitu tidak ada alasan untuk tidak memberikan informasi kepada publik selama informasi tersebut tidak bersifat dikecualikan dan terbatas. Penyelenggaraan KIP dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sesuai hasil penilaian KIP yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, Basarnas mendapatkan realisasi kinerja Skor KIP 89,375 dengan kategori “Menuju Informatif”, dari target nilai 80. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 112%. Berikut ini adalah penghargaan yang diterima oleh Basarnas dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.



KATEGORI MENUJU INFORMATIF

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	89,38
2	Badan Informasi Geospasial	87,69
3	Badan Pemeriksa Keuangan	84,60
4	Badan Riset dan Inovasi Nasional	84,50
5	Komisi Yudisial	84,42
6	Perpustakaan Nasional	83,89
7	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	83,72
8	Majelis Permusyawaratan Rakyat	79,88

Dari hasil analisa dengan melihat hasil perbandingan dari tahun 2020 s.d tahun 2022 maka dapat dilihat adanya kenaikan dan penurunan terhadap hasil capaian kinerja terhadap indikator kinerja Skor Keterbukaan Informasi Publik Basarnas. Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan oleh dinamika kebijakan nasional dan penambahan terhadap indikator penilaian (dari 47 indikator penilaian menjadi 96 indikator penilaian).

Perbandingan Skor KIP Basarnas tahun 2020 s.d 2022



Beberapa kegiatan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Basarnas yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain adalah:

- a. Kick Off e-Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 Agustus 2022 bertempat di Pullman Hotel Jakarta dan dihadiri oleh seluruh PPID Kementerian/ Lembaga serta PPID Lembaga Negara Non Kementerian dan PPID Badan Publik.





b. Presentasi uji publik keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022 bertempat di Redtop Hotel Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Utama Basarnas, Kepala Pusdatin Basarnas, dan 5 orang personil Pusdatin Basarnas.



c. Kunjungan dan koordinasi hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 21 Desember 2022 yang

dilaksanakan di kantor pusat Komisi Informasi Pusat. Kegiatan ini diikuti oleh 3 orang personil perwakilan dari Pusdatin.



B. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan

Sasaran kegiatan meningkatnya ketersediaan teknologi informasi pencarian dan pertolongan diukur dengan indikator:

1. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas
2. Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional
3. Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional

Capaian indikator kinerja Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya ketersediaan	1. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Baik (2,6)	Baik (2,85)	110%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan	2. Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	98%	84%	86%
	3. Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	70%	98%	140%

Tabel Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran kegiatan 2 tahun 2022 dengan tahun 2020 dan tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	2020	Baik (2,6)	Baik (2,97)	114%
	2021	Baik (2,6)	Baik (2,75)	106%
	2022	Baik (2,6)	Baik (2,85)	110%
2. Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	2020	98%	99,37%	101%
	2021	98%	96,09%	98%
	2022	98%	84%	86%
3. Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	2020	50%	27,27%	55%
	2021	60%	27,27%	45%
	2022	70%	98%	140%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja **Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas**

Untuk mencapai indikator kinerja ini, Pusdatin berusaha untuk memenuhi standar penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah

penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Yang dimaksud pengguna SPBE disini adalah meliputi instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Penerapan SPBE di lingkungan Basarnas telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan yang disesuaikan dengan perencanaan dan kebutuhan instansi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Agar pelaksanaan SPBE dapat mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian SPBE yang dilakukan oleh Kementerian PANRB ini menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di lingkungan Basarnas, dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan unsur tata Kelola dan kehandalan teknologi informasi serta layanan yang diberikan kepada pengguna.

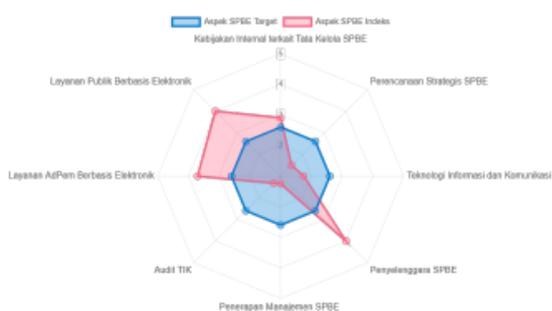
Sesuai hasil penilaian SPBE yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, Basarnas mendapatkan realisasi Nilai Indeks SPBE 2,85 dengan predikat “Baik”, dari target nilai 2,6. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 110%.

Nilai Indeks SPBE Basarnas Tahun 2022

INDEKS SPBE – BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

2,85
(Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2022
SPBE	2,85
Domain Kebijakan SPBE	2,90
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	2,90
Domain Tata Kelola SPBE	2,10
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,50
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	4,00
Domain Manajemen SPBE	1,27
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,25
<i>Audit TIK</i>	1,33
Domain Layanan SPBE	3,82
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,70
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,00

Dari hasil analisa dengan melihat hasil perbandingan dari tahun 2020 s.d tahun 2022 maka dapat dilihat adanya kenaikan dan penurunan terhadap hasil capaian kinerja terhadap indikator kinerja Nilai Indeks SPBE. Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan oleh dinamika kebijakan nasional dan penambahan terhadap indikator SPBE (dari 37 indikator penilaian menjadi 47 indikator penilaian).

Upaya yang dilakukan oleh Pusdatin dalam memenuhi indikator penilaian SPBE antara lain salah satunya adalah melaksanakan audit TIK sebagai salah satu syarat pemenuhan indikator penilaian. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut maka pencapaian kinerja pada indikator kinerja Nilai Indeks SPBE ini seluruhnya telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Berikut ini merupakan kegiatan SPBE yang telah dilaksanakan oleh Pusdatin selama tahun 2022, antara lain:

- a. Bimbingan Teknis Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE
Kegiatan bimbingan teknis ini dilaksanakan secara zoom meeting pada tanggal 2 Juni 2022 yang diikuti oleh 20 orang peserta (6 orang peserta merupakan perwakilan dari Inspektorat, dan 14 orang peserta merupakan peserta dari Pusdatin). Dalam kegiatan ini mengundang 1 orang narasumber dari Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Materi yang dibawakan dalam kegiatan yang dilaksanakan selama 1 hari ini mengambil judul “Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SPBE dengan Audit Tools”.

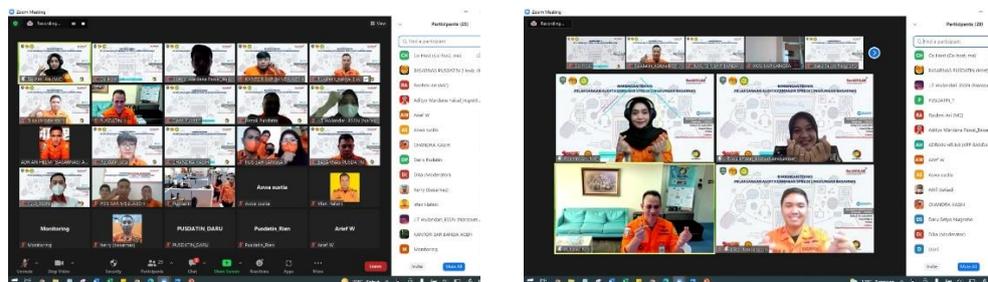
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme ASN dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penerapan tata kelola dan tata laksana SPBE yang dilaksanakan di Basarnas.





b. Bimbingan Teknis Audit Keamanan SPBE

Kegiatan bimbingan teknis ini dilaksanakan secara zoom meeting pada tanggal 22 Juni tahun 2022 yang diikuti oleh 20 orang peserta (6 orang peserta merupakan perwakilan dari Inspektorat, dan 14 orang peserta merupakan peserta dari Pusdatin). Dalam kegiatan ini mengundang 1 orang narasumber dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Materi yang dibawa dalam kegiatan yang dilaksanakan selama 1 hari ini mengambil judul “Audit Keamanan SPBE”.

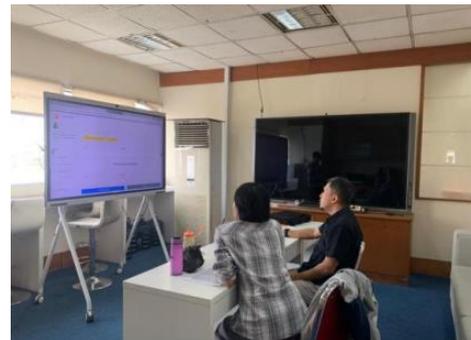


c. Kegiatan Audit SPBE

Kegiatan audit ini merupakan bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPBE dalam rangka memenuhi kriteria penilaian internal. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini menjadi hal yang esensial dan penting untuk dilaksanakan kaitannya agar dapat memberikan keamanan terhadap perlindungan aset, integritas data, serta efektivitas dan efisiensi dari sistem yang telah dibangun agar tetap berfungsi secara baik dan optimal.

Penilaian mandiri Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dilakukan oleh Auditor dan Auditee dengan memanfaatkan *tools* audit infrastruktur dan aplikasi SPBE yang telah disediakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) selaku Lembaga Pemerintah yang ditunjuk dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE untuk menyelenggarakan audit, yang diakses melalui <https://audit-infrastruktur-aplikasi.bppt.go.id/webaudit-v2/home>.

Pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi ini meliputi audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan SPBE. Kegiatan audit SPBE ini dilaksanakan pada tanggal 27 – 30 Juni 2022. Audit Keamanan SPBE, meliputi audit keamanan infrastruktur (jaringan), audit keamanan aplikasi (QRSAR). Sedangkan untuk audit infrastruktur meliputi audit infrastruktur pusat data dan audit infrastruktur jaringan intra pemerintah (JIP).



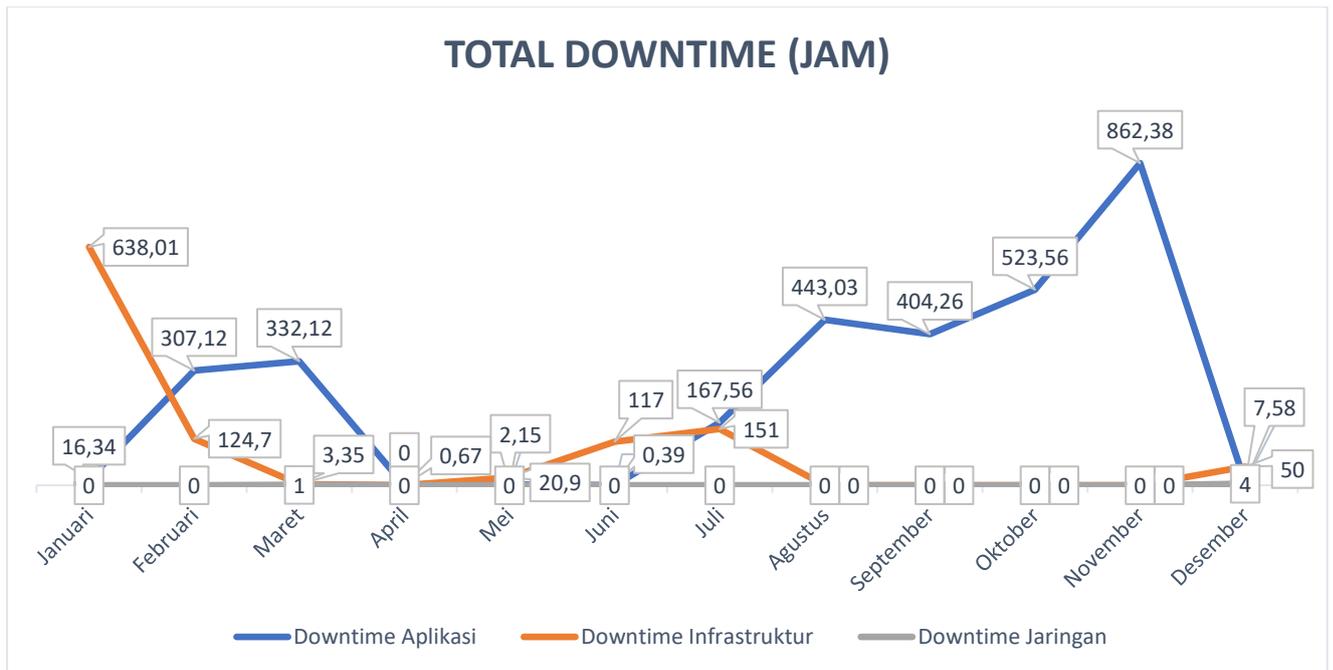
2. Indikator Kinerja **Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional**

Pengukuran kinerja ini adalah dengan melakukan pemantauan terhadap kinerja seluruh aplikasi dan jaringan yang telah dibangun dan dikembangkan agar tidak terjadi “*downtime*”. Pengertian *downtime* ini

sendiri adalah suatu kondisi dimana baik web, aplikasi, jaringan maupun infrastruktur tidak dapat diakses dan digunakan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dapat terjadi karena kendala teknis yang terjadi pada sistem, karena faktor tidak stabilnya pasokan listrik, ataupun karena faktor kelalaian manusia.

Kerugian yang timbul karena adanya *downtime* tidak hanya dari sisi finansial berupa kerusakan peralatan saja, namun dari sisi produktivitas karena organisasi juga akan mengalami penurunan kinerjanya. Oleh sebab itu monitoring penting dan krusial untuk terus menerus dilakukan agar *downtime* dapat dihindari dan diminimalisir. Berikut ini merupakan rekapitulasi *downtime* aplikasi, jaringan dan infrastruktur yang terjadi selama tahun 2022.

Bulan	Total Waktu Downtime (dalam Jam)		
	Aplikasi	Infrastruktur	Jaringan
Januari	16,34	638,01	0
Februari	307,12	124,7	0
Maret	332,12	3,35	1
April	0	0,67	0
Mei	2,15	20,90	0
Juni	0,39	117,00	0
Juli	167,56	151,00	0
Agustus	443,03	0,00	0
September	404,26	0,00	0
Oktober	523,56	0,00	0
November	862,38	0,00	0
Desember	7,58	50,00	4
Total	3066,49	1105,66	5



Dari tabel perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020 s.d. 2022 dapat dilihat bahwa capaian dari indikator kinerja **persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional** mengalami penurunan. Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan oleh adanya kendala teknis yang terjadi pada perangkat data center yang mengalami *failure*. Kondisi *failure* perangkat ini disebabkan ketidakmampuan sistem perangkat lunak atau komponen untuk melakukan fungsi yang diperlukan dalam persyaratan kinerja yang ditentukan.

Berdasarkan hasil analisa terhadap kondisi tersebut, terdapat kerusakan perangkat (*hardware*) yang berpengaruh kepada kerusakan *Virtual Machine* (VM) pada server Aplikasi Manajerial yang berimbas kepada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan file virtual disk VM tersebut tidak dapat dibaca sehingga harus dilakukan penanganan khusus pada perangkat serta dilakukan *recovery data* pada aplikasi simpeg yang tidak terbaca pada perangkat yang rusak.

Hal tersebut berdampak terhadap penurunan terhadap kinerja organisasi dari target yang telah ditentukan, karena *failure* yang terjadi baik diperangkat maupun diaplikasi saling memiliki keterkaitan. Sesuai data yang dihimpun tersebut didapatkan nilai realisasi kinerja sebesar 84% dari target 98%. Dengan demikian nilai capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 86%. Harapan kedepannya adalah agar seluruh infrastruktur teknologi informasi dan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dapat lebih dipantau kondisinya dengan lebih baik.

Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan adalah:

- Maintenance IT System Support
- Operasional Jaringan IT
- Pemeliharaan Data Maritim
- Pembayaran Lisensi Aplikasi
- Langganan Operasional Domain Basarnas

Berikut ini merupakan kegiatan maintenance IT system support selama tahun 2022.

- ✓ Revitalisasi Backbone Infrastruktur Jaringan Pusat Data
- ✓ Integrasi dan Optimalisasi Infrastruktur
- ✓ Optimalisasi dan Integrasi Aplikasi Khusus
- ✓ Optimalisasi dan Integrasi Aplikasi Umum
- ✓ Revitalisasi elektrikal Pusat Data, meliputi: Penggantian Baterai UPS, Perangkat pendukung operasional data dan jaringan, Pemasangan Water Leak Detection di Data Center Basarnas, Penggantian Spare Part UPS PowerScale, Penggantian Spare Part Server Supermicro.
- ✓ Jasa Pemeliharaan SAR Mobile IT Vehicle
- ✓ Perbaikan perangkat printer operasional
- ✓ Pengadaan perangkat workshop
- ✓ Pengadaan perangkat pengelola jaringan

- ✓ Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi Penunjang Operasi SAR
- ✓ Pengadaan pendukung layanan teknologi informasi.
- ✓ Jasa Pemeliharaan Peralatan Data Center
- ✓ Jasa maintenance DRC LPSE
- ✓ Jasa Recovery Data Aplikasi Simpeg Basarnas

3. Indikator Kinerja **Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional**

Tolok ukur yang digunakan untuk mencapai target indikator kinerja ini adalah dengan menghitung dukungan teknologi informasi yang telah diberikan oleh Pusdatin dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional di lingkungan Basarnas. Kegiatan pemanfaatan teknologi informasi tersebut salah satunya adalah dalam bentuk asistensi dan dukungan personil Pusdatin dalam menyediakan perangkat dan koneksi jaringan internet yang stabil.

Pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi saat ini semakin banyak digunakan sejak pandemi Covid-19 melanda dunia. Budaya *online* secara otomatis merubah segala bentuk kegiatan dan aktivitas manusia. Transformasi digital telah menjadi era *new normal* guna mengurangi dampak meluasnya penyebaran virus. Solusi inilah yang juga telah digunakan dalam seluruh kegiatan operasional perkantoran. Mulai dari pemanfaatan aplikasi *e-office* hingga dilaksanakannya rapat secara daring. Cara ini dinilai sangat efektif dan efisien untuk dilakukan selama adanya ketersediaan jaringan internet yang memadai. Instansi Basarnas sendiri juga telah memaksimalkan penggunaan *platform* digital di lingkungan kerjanya.

Kegiatan dukungan dan asistensi yang telah dilakukan oleh Pusdatin selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dukungan siaga lebaran, kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan monitoring terhadap siaga SAR khusus lebaran yang dilaksanakan pada tanggal 28 April s.d 1 Mei.

2. Dukungan dalam latihan SAR bersama antara Malaysia dan Indonesia (SAREX – MALINDO) ke – 41 pada tanggal 19 – 23 September 2022 dengan mengambil lokasi di Tanjung Pinang dan Batam, dan diikuti oleh 4 personil Pusdatin.
3. Kegiatan Asistensi dan Instalasi Peralatan pada Posko Siaga SAR Nataru pada tanggal 16 Desember 2022 sd 3 Januari 2023 bertempat di Kementerian Perhubungan diikuti oleh 4 orang personil Pusdatin.
4. Dukungan 18 orang personil Pusdatin pada operasi pencarian dan pertolongan dengan melakukan asistensi terhadap pengalokasian jaringan internet dan perangkat video conference di lokasi gempa bumi Cianjur pada tanggal 21 November – 6 Desember 2022.
5. Dukungan asistensi daring yang dilakukan oleh personal Pusdatin bertujuan untuk memantau dan memastikan jaringan internet yang digunakan dalam kegiatan daring tersebut terkoneksi dengan baik dan stabil.

Rekapitulasi asistensi daring oleh Pusdatin selama tahun 2022.

Pelaksanaan asistensi daring Pusdatin selama tahun 2022												Jumlah
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	
12	18	17	12	3	3	7	7	5	11	5	6	106

Berdasarkan data tersebut di atas maka realisasi indikator kinerja **persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional** mencapai 98% dari target sebesar 70%, sehingga dapat diketahui nilai capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah sebesar 140%. Berdasarkan hasil capaian ini maka dukungan teknologi informasi dan personil dalam mendukung kegiatan operasional perkantoran telah terlaksana dengan baik.

Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan adalah:

- IT Technical Support
- Pengembangan Visualisasi Kolaborasi Streaming
- Pengembangan Aplikasi Manajemen Informasi

Meskipun capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami peningkatan, namun dari hasil analisa dengan melihat hasil perbandingan terhadap tahun sebelumnya maka dapat dilihat adanya penurunan terhadap hasil capaian kinerja ini. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan moratorium dari pemerintah yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, dan urgensi pembangunan Pusat Data Nasional terintegrasi yang disebutkan dalam lampiran Peraturan Presiden 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019, serta penerapan reformasi birokrasi yang lebih efektif dan efisien guna menghemat anggaran belanja negara, maka seluruh instansi pemerintah melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data (*data recovery center*) untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama.

Kebijakan lainnya dari pemerintah adalah adanya percepatan SPBE untuk mewujudkan penerapan aplikasi umum dan infrastruktur SPBE yang dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB. Melalui penerapan aplikasi umum tersebut diharapkan seluruh instansi pemerintah tidak lagi membangun aplikasi sendiri-sendiri yang berdampak pada pemborosan anggaran negara. Seluruh pengusulan atas pembangunan infrastruktur dan aplikasi ini diajukan melalui alamat situs www.ega-spbe.layanan.go.id

Portal *ega-spbe* atau Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tersebut merupakan aplikasi yang berbasis website yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk memudahkan Kementerian dan Lembaga pemerintahan dalam mengajukan program kegiatan yang berkaitan dengan SPBE.

C. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin

Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas ketatausahaan dan SDM Pusdatin diukur dengan indikator:

1. Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel
2. Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas

Capaian indikator kinerja Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin	1. Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	85%	90%	106%
	2. Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	80%	100%	118%

Tabel Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran kegiatan 3 tahun 2022 dengan tahun 2020 dan tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	2020	83%	77,25%	93%
	2021	83%	78,56%	95%
	2022	85%	90%	106%
2. Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	2020	70%	82,98%	119%
	2021	75%	89,23%	119%
	2022	80%	100%	118%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja **Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel**

Untuk mencapai target pada indikator kinerja ini diukur dengan melihat hasil realisasi anggaran pada tahun berjalan serta kegiatan pengarsipan yang dilaksanakan di lingkungan Pusdatin. Pelaksanaan dua kegiatan tersebut dapat menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja ketatausahaan. Berikut ini merupakan rincian alokasi dan realisasi anggaran pada tahun 2022.

No.	Uraian	Nilai
1	Pagu anggaran	Rp. 21.161.333.000,-
2	Realisasi anggaran	Rp. 20.853.493.311,-
	Prosentase capaian anggaran	98,55%

Dibawah ini merupakan tabel kegiatan pengarsipan

No.	Uraian	Jumlah Arsip
1	Formulir Peminjaman Arsip	212
2	Daftar Berkas	262
	Prosentase capaian arsip	80,92%

Berdasarkan kedua table tersebut diatas maka penghitungan capaian kegiatan ketatausahaan adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

A	$\% = \frac{(\text{jumlah realisasi penyerapan anggaran})}{\text{jumlah anggaran yang diterima}} * 100$
B	$\% = \frac{(\text{jumlah penggunaan arsip})}{\text{jumlah berkas}} * 100$

$$\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2} \times 100$$

Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan bahwa realisasi kegiatan ketatausahaan adalah sebesar 89,73% dari target kinerja 85%. Maka capaian kinerja kegiatan ketatausahaan menjadi sebesar 106%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut terdapat peningkatan terhadap capaian kinerja apabila dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan ketatausahaan telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya, penyebab keberhasilan/ kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja tersebut adalah seluruh kegiatan pengarsipan telah tercatat dan terdokumentasi sesuai dengan prosedur, serta adanya langkah tindaklanjut dari hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Biro Umum selaku Unit Kearsipan I di lingkungan Basarnas. Berdasarkan hasil Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) tahun 2022, Pusdatin mendapatkan nilai 81,98 dengan kategori “A” (memuaskan). Nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang mendapatkan nilai 77,83 dengan kategori “BB” (sangat baik).

Kegiatan lain yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan anggaran dan kearsipan yang diselenggarakan pada tanggal 23 – 25 Januari 2022 bertempat di Hotel D’Anaya Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh 10 orang peserta (9 orang personil Pusdatin dan 1 orang personil perwakilan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan).





2. Indikator kinerja **Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas**

Pengukuran capaian kinerja yang digunakan pada indikator ini adalah dengan melaksanakan pembinaan kompetensi SDM seperti melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan amanat yang disampaikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana disebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi. Oleh karena itu maka program Pembinaan Kompetensi SDM wajib dan perlu untuk diadakan, agar personil dapat lebih mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sehingga pemanfaatannya dapat lebih dioptimalkan.

Pada tahun 2022 Pusdatin telah melaksanakan 3 kegiatan Pembinaan Kompetensi SDM, antara lain:

- a. Pelatihan Manajemen Talenta Angkatan II Tahun 2022. Pelatihan ini dilaksanakan dengan 2 metode, yaitu pada tanggal 2 sd 5 Juni 2022 pembelajaran dilakukan secara mandiri, dan pada tanggal 6 sd 9 Juni 2022 pembelajaran dilaksanakan di Kampus PPLPN Lembaga Administrasi Negara. Perwakilan dari Pusdatin dalam pelatihan ini diikuti oleh Kasubag Tata Usaha Pusdatin.

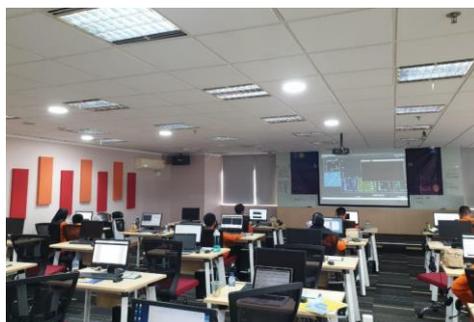


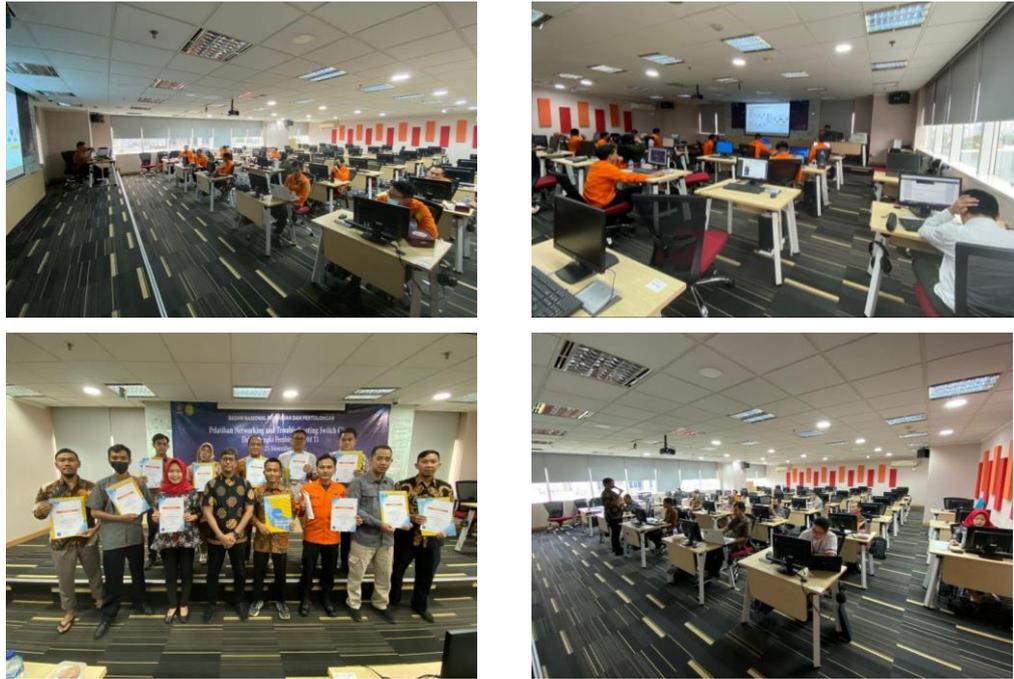
- b. Pelatihan *Course Data Center Professional* pada tanggal 14 – 18 November 2022 bertempat di ruang lab IT Basarnas lantai 4. Kegiatan ini diikuti oleh 13 orang peserta (8 orang peserta merupakan perwakilan dari Pusdatin, serta 5 orang peserta yang merupakan perwakilan dari Direktorat Komunikasi, Direktorat

Operasi, Direktorat Kesiapsiagaan, Biro Perencanaan dan Keuangan, dan dari Biro Umum).



c. Pelatihan *Networking and Troubleshooting Switch Cisco, Mikrotik, and Access Point Cisco* pada tanggal 23 – 25 November 2022 bertempat di ruang Lab IT Lantai 4, diikuti oleh 13 orang peserta yang seluruhnya merupakan perwakilan dari Pusdatin.





Mengacu dari hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan kompetensi SDM tersebut diperoleh realisasi kinerja sebesar 100% dari target sebesar 85%. Maka diperoleh hasil capaian kinerja pada indikator ini sebesar 118%. Dari tabel perbandingan tahun 2020 s.d 2022 pada indikator kinerja Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas dalam mendukung sasaran Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin juga telah mencapai targetnya dan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

3.4. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan semua rencana kegiatan yang telah disebutkan di atas, pada awal tahun 2022 Pusdatin mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 21.824.452.000,-** (dua puluh satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) namun terkait adanya pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) yang diperuntukkan bagi mitigasi dampak berlanjutnya pandemi Covid-19 dan kebijakan menjaga pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN, pagu anggaran Pusdatin terkena *automatic adjustment* dengan nilai total blokir

sebesar **Rp. 663.119.000,-** (*enam ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah*), maka alokasi pagu anggaran akhir Pusdatin menjadi sebesar **Rp. 21.161.333.000,-** (*dua puluh satu milyar seratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*). Dengan total realisasi anggaran Pusdatin tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 20.853.493.311,-** (*dua puluh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah*) dan total prosentase realisasi anggaran mencapai **98,55%**.

Adapun besaran pagu untuk masing-masing sasaran kinerja beserta realisasinya adalah sebagai berikut.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Tersedianya data dan informasi yang akurat	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	520.481.000,-	512.853.363,-	98,53
		Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat			
		Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
2.	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	20.340.852.000,-	20.045.346.898,-	98,55
		Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional			
		Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional			
3.	Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	300.000.000,-	295.293.050,-	98,43
		Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas			
Total			21.161.333.000,-	20.853.493.311,-	98,55

Matriks Capaian Kinerja Pusdatin Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kinerja		Program	Anggaran		
			Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	%
1. Tersedianya data dan informasi yang akurat	1. Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	100%	100%	100%	Dukungan Manajemen	237.781.000	236.279.551	99,37 %
	2. Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	100%	91,67%	92%		102.700.000	102.113.203	99,43 %
	3. Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,37)	112%		180.000.000	174.460.609	96,92 %
2. Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan	4. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Baik (2,6)	Baik (2,85)	110%		64.400.000	39.158.384	60,80 %
	5. Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	98%	84%	86%		16.107.800.000	15.895.998.352	98,69 %
	6. Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	70%	98%	140%		4.168.652.000	4.110.190.162	98,60 %
3. Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin	7. Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	85%	90%	106%		50.000.000	49.969.050	99,94 %
	8. Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	80%	100%	118%		250.000.000	245.324.000	98,13 %
					Total	21.161.333.000	20.853.493.311	98,55%

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen pertanggungjawaban mengenai hasil capaian kinerja organisasi sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Berdasarkan uraian pada LAKIP ini dapat disimpulkan bahwa hasil capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan Pusdatin telah berjalan dengan baik. Setiap hambatan yang ditemui berusaha dicari solusi terbaik untuk mengatasinya. Harapannya adalah melalui laporan ini transparansi dan akuntabilitas kinerja menuju *good governance* dapat terwujud dengan baik.

4.2. Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan dan pencapaian kinerja Pusdatin pada tahun 2022 antara lain:

- 1) Terbatasnya sumber daya IT (manusia, infrastruktur, jaringan, dan aplikasi yang terintegrasi) dalam menunjang layanan (Proses Bisnis) pencarian dan pertolongan belum memadai dihadapkan tuntutan tata kelola dan tata laksana layanan digitalisasi **SPBE** dalam implementasi yang **mudah diakses dan berbagi pakai** menuju **Satu Data Indonesia (SDI)**.
- 2) Kondisi Data Center Pusdatin Basarnas saat ini dihadapkan dengan *Lifetime* dan *End of Life* dan memerlukan modernisasi melalui revitalisasi dan integrasi infrastruktur dan jaringan, serta pengembangan aplikasi yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi serta tuntutan **digitalisasi** (tier 1 s.d. 4).
- 3) Belum optimalnya penyediaan dan penggunaan layanan infrastruktur dan aplikasi oleh *users* (**IT Behaviour/ IT Culture**) dalam proses bisnis/ pelayanan Pencarian dan Pertolongan.

- 4) Kebijakan *automatic adjustment/ refocusing/* realokasi anggaran dari pemerintah yang diperuntukkan bagi penanganan pandemi Covid-19 berdampak pada adanya penyesuaian kegiatan atau bahkan kegiatan tertunda pelaksanaannya dan tidak dapat dilaksanakan.
- 5) Kurangnya kesadaran dari unit kerja maupun unit pelaksana teknis dalam melakukan pemutakhiran data pada aplikasi yang telah dibangun. Hal ini berakibat pada minimnya data yang tersedia sehingga dapat menghambat proses pengumpulan dan pengolahan data.

4.3. Tindak Lanjut

Berikut ini merupakan tindak lanjut yang diambil dalam rangka memperbaiki kinerja Pusdatin kedepannya:

- 1) Peningkatan tata kelola (aturan-aturan) dan tata laksana (program) SPBE dan SDI Basarnas yang sesuai dengan semangat smart government, digital melayani dengan sinergi dan kolaborasi secara konsisten, bertahap dan terjadwal.
- 2) Revitalisasi dan peremajaan serta migrasi infrastruktur data center Pusdatin sesuai dengan semangat transformasi smart government dan digital melayani.
- 3) Pemenuhan diklat-diklat teknis SDM IT dan statistik sesuai kebutuhan secara terprogram, serta peningkatan program-program sosialisasi, bimbingan teknis, profisiensi, simulasi penggunaan layanan perangkat IT dan aplikasi serta pengelolaan data.
- 4) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan awal yang telah telah disepakati dan dapat dilakukan langkah perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berikutnya serta menjadi bahan dalam mengukur kinerjanya.
- 5) Membangun komitmen dan *IT Behavior* seluruh pegawai dalam mengoptimalkan infrastruktur, jaringan dan sistem informasi yang telah ada dalam rangka menuju *smart government*.

- 6) Untuk mewujudkan kinerja Pusdatin yang lebih berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu untuk mengevaluasi dan mereviu setiap indikator kinerja yang ada.
- 7) Dalam rangka meningkatkan dan mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan Pusdatin, disarankan agar Pusdatin membuat survei terhadap setiap layanan yang diberikan, sehingga dapat diketahui umpan balik/*feedback* untuk langkah perbaikan kinerja kedepannya.
- 8) Perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja, unit pelaksana teknis, dan instansi terkait serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*), agar seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dapat diimplementasikan dan bersinergi dengan lebih baik.

LAMPIRAN

Tabel Dialog Kinerja

Jabatan		Indikator Kinerja								
Kepala Pusat Data dan Informasi	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas		
		Rencana Kinerja								
Kepala Subagian Tata Usaha								Pemenuhan indikator penilaian audit kearsipan internal	Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel	Pengembangan SDM berbasis kompetensi terselenggara sesuai standar layanan yang berlaku
Arsiparis Mahir								Tersedianya dokumen penggunaan arsip		
								Terciptanya daftar arsip vital		
								Terlaksananya pemindahan arsip inaktif		
Arsiparis Terampil	Tersedianya berita acara Sinkronisasi Data							Tersedianya dokumen penciptaan arsip terlaksana tepat waktu		
								Pemberkasan arsip konvensional secara lengkap		
								Pemberkasan secara elektronik		
								Tersedianya dokumen penyeleksian arsip tahun 2010-2014 dan 2015-2018 yang akan dipindahkan		

Jabatan	Indikator Kinerja										
			Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas		
Rencana Kinerja											
Kepala Pusat Data dan Informasi											
Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran										Terpenuhinya dokumen perencanaan anggaran yang sesuai dengan usulan kebutuhan	
										Tersusunnya Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk tahun anggaran berjalan	
										Rencana Umum Pengadaan kegiatan tahun anggaran berjalan diumumkan melalui aplikasi SIRUP	
										Kertas kerja rewiu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ) disampaikan secara berkala	
										Daftar pengajuan evaluasi anggaran (clearance) SPBE yang direkomendasikan untuk dilanjutkan	

Jabatan										
Indikator Kinerja										
Kepala Pusat Data dan Informasi	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas		
Rencana Kinerja										
									Perjanjian Kinerja ditandatangani dan disahkan	
									Penyerapan anggaran dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai target yang telah direncanakan	
									Termutakhirkannya aplikasi Smart DJA, e-Money Bappenas, SIPMONEV Basarnas, dan esr.menpan.go.id secara berkala dan tepat waktu.	
									Dokumen evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	
									Dokumen Perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan direvisi sesuai Kebutuhan	
									Laporan tahunan disusun dan disampaikan tepat waktu	

Jabatan		Indikator Kinerja										
Kepala Pusat Data dan Informasi	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas				
		Rencana Kinerja										
Statistisi Ahli Madya	Tersusunnya kebijakan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan	Pemenuhan nilai indeks evaluasi penilaian statistik sektoral	Peningkatan pelayanan data statistik	Pemenuhan nilai indeks kepuasan masyarakat atas unit layanan publik Basarnas	Tersedianya nilai indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Basarnas							
Statistisi Ahli Muda	Rancangan peraturan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan	Tersedianya Kompilasi Standar Data dan Metadata Operasi SAR	Buku Statistik tersaji secara akurat	Hasil pengisian kuesioner survei atas unit layanan operasi pencarian dan pertolongan, layanan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan, layanan registrasi beacon periode triwulan I dan III tahun 2022	Pemenuhan kuesioner penilaian KIP Basarnas secara lengkap							
		Tersedianya Kompilasi Standar Data dan Metadata Distress Alert		Tingkat kepuasan responden terhadap unit layanan operasi pencarian dan pertolongan, layanan pembinaan potensi, dan layanan registrasi beacon triwulan II tahun 2022.								

Jabatan		Indikator Kinerja									
Kepala Pusat Data dan Informasi	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data			Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	
		Rencana Kinerja									
Statistisi Pertama	Tersedianya bahan penyusunan kebijakan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan	Penyusunan Metadata Indikator Operasi SAR	Atribut data Operasi, Sarana, Personil, Pelatihan Potensi, Sistem Komunikasi, Produk Hukum, Penyerapan Anggaran, Latihan, Siaga, Diklat SAR; Kerjasama Dalam dan Luar Negeri; Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Informasi disusun dalam bentuk tabel.	Hasil pengisian kuesioner survei atas unit layanan operasi pencarian dan pertolongan, layanan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan, layanan registrasi beacon periode triwulan II tahun 2022.							
		Penyusunan Metadata Variabel Operasi SAR		Tingkat kepuasan responden terhadap unit layanan operasi pencarian dan pertolongan, layanan pembinaan potensi, dan layanan registrasi beacon triwulan I dan III tahun 2022.							

Jabatan	Indikator Kinerja													
Kepala Pusat Data dan Informasi	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data			Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas				Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel		Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas
	Rencana Kinerja													
Statistisi Pelaksana Lanjutan			Pengumpulan data Sistem Komunikasi, Produk Hukum, Penyerapan Anggaran, Latihan, Siaga, Diklat SAR; Kerjasama Dalam dan Luar Negeri; Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Informasi secara lengkap dan uptodate.											
Statistisi Terampil			Pengumpulan data Operasi SAR, Sarana SAR, Personil SAR, dan Pelatihan Potensi SAR secara lengkap dan uptodate.	Penyusunan Standar Data Operasi SAR										
				Penyusunan Standar Data Distress Alert										
				Penyusunan Metadata Kegiatan Operasi SAR										
				Penyusunan Metadata Kegiatan Distress Alert										
				Penyusunan Metadata Indikator Distress Alert										
				Penyusunan Metadata Variabel Distress Alert										

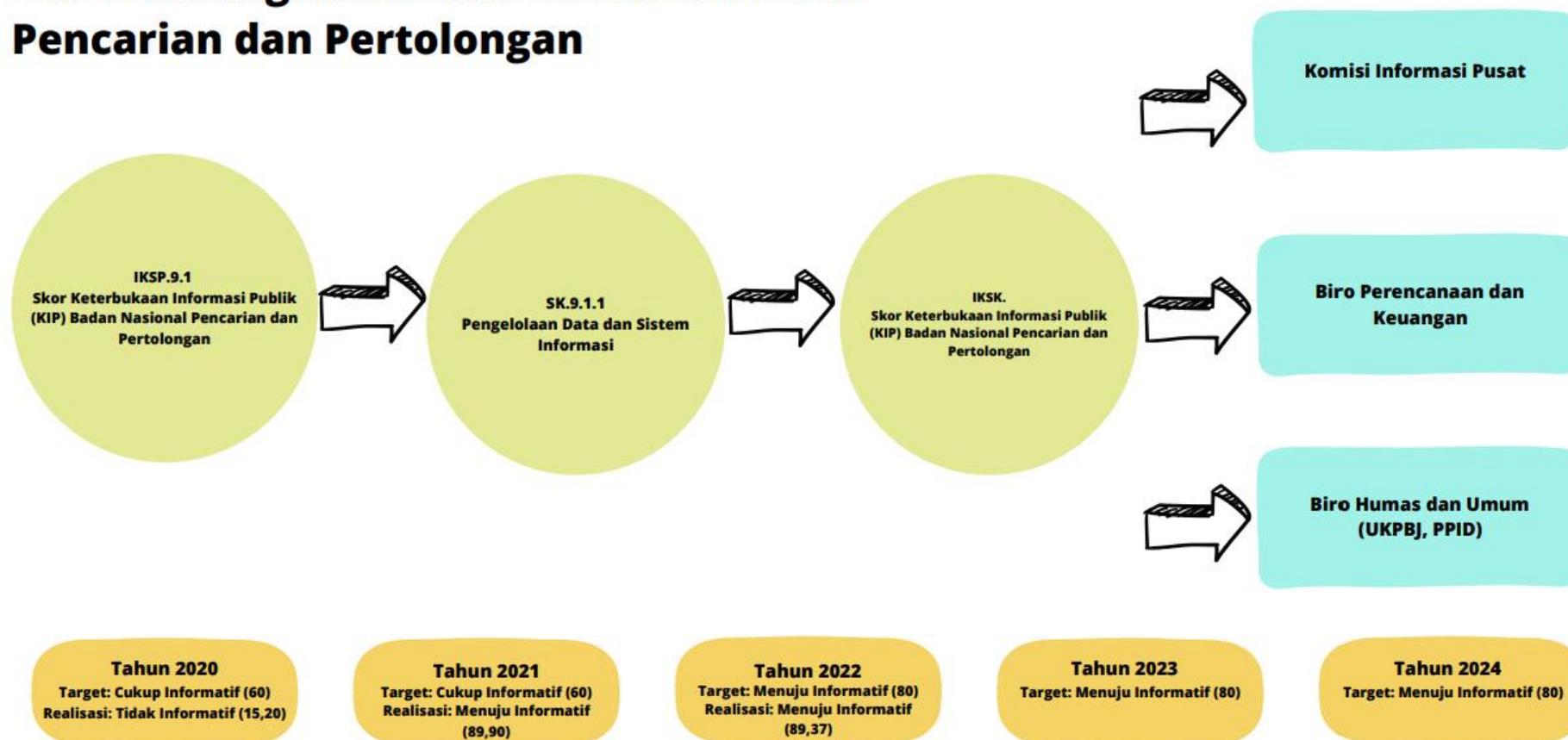
Jabatan	Indikator Kinerja													
Kepala Pusat Data dan Informasi	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data			Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas			Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional		Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel		Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas
	Rencana Kinerja													
Pranata Komputer Ahli Madya						Terpenuhinya penyusunan kebijakan tata kelola teknologi informasi	Pemenuhan data dukung indikator SPBE	Pemenuhan tools Audit SPBE	Peningkatan kesiapan aplikasi sistem informasi	Peningkatan kesiapan infrastruktur teknologi informasi	Peningkatan layanan teknologi informasi			
Pranata Komputer Ahli Muda						Tersedianya bahan penyusunan Rencana Induk SPBE	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanganan Insiden Siber	Terpenuhinya dokumen data audit teknologi	Dokumentasi Pengembangan Sistem Informasi disusun secara lengkap dan akurat (Aplikasi Umum)	Tersedianya jaringan yang siap digunakan	Respon yang cepat dan akurat atas pengaduan pegawai terhadap layanan teknologi informasi			Penyusunan kajian kebutuhan pembinaan kompetensi SDM
						Tersedianya bahan penyusunan penyelenggaraan SPBE	Terpenuhinya dokumen manajemen risiko TI	Penyusunan dokumen manajemen keamanan	Dokumentasi Pengembangan Sistem Informasi disusun secara lengkap dan akurat (Aplikasi Khusus)	Tersedianya perangkat teknologi informasi untuk mendukung operasional	Tersedianya hasil monitoring permasalahan layanan infrastruktur			Jumlah SDM TI yang tersertifikasi
						Penyusunan bahan kajian kebijakan TI	Terpenuhinya dokumen manajemen pengetahuan layanan TI		Laporan deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan teknologi data disusun secara akurat dan valid (Aplikasi Umum)		Tersedianya layanan peralatan vicon dan monitoring jaringan sesuai dengan kebutuhan			
							Terpenuhinya dokumen manajemen data		Tersusunnya Laporan deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan teknologi data (Aplikasi Khusus)					

Jabatan		Indikator Kinerja										
Kepala Pusat Data dan Informasi	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas				
Rencana Kinerja												
						Terpenuhinya dokumen manajemen perubahan		Dokumen KAK aplikasi khusus disusun berdasarkan rencana kegiatan				
						Terpenuhinya dokumen manajemen SDM		Dokumen KAK aplikasi umum disusun berdasarkan rencana kegiatan				
						Terpenuhinya dokumen layanan akuntabilitas kinerja		Laporan pengelolaan insiden kegiatan teknologi informasi yang ditindaklanjuti				
						Terpenuhinya dokumen layanan JDIH		Terselesaikannya pengembangan aplikasi Sibinpot, e-dupak, rescue 115, simonev, registrasi beacon secara tepat waktu				
								Seluruh pegawai mendapatkan akun aplikasi umum dan khusus secara cepat				
								tersedianya backup data berupa file secara berkala				
Pranata Komputer Ahli Pertama	Membuat Module Website Portal Satu Data Basarnas							Deteksi dan perbaikan terhadap insiden/ permasalahan teknologi informasi yang ditindak lanjuti (Aplikasi Khusus)	Tersedianya pengadministrasian teknologi	Terpenuhi Dukungan Teknologi Informasi dalam kegiatan Operasi SAR		Jumlah SDM TI yang tersertifikasi

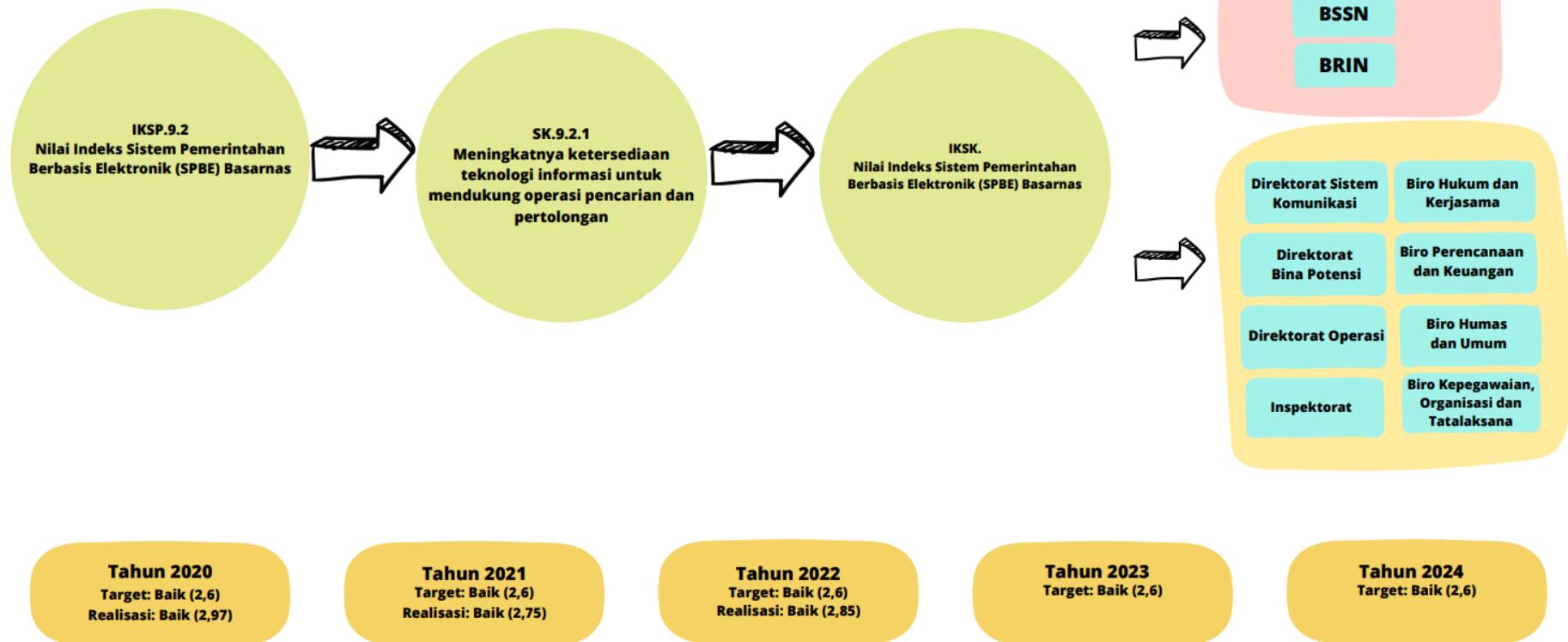
Jabatan	Indikator Kinerja														
Kepala Pusat Data dan Informasi	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data			Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat		Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas			Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional		Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas
Rencana Kinerja															
	Menyediakan akses portal Satu Data										Deteksi dan perbaikan terhadap insiden/ permasalahan teknologi informasi yang ditindak lanjuti (Aplikasi Umum)	Pengujian dan Pemasangan Infrastruktur TI	Tersedianya Objek Multimedia sesuai dengan kebutuhan		
											Analisa perilaku akses pengguna layanan	Terselenggaranya kegiatan daring			
Pranata Kompuler Mahir	Menyusun Rancangan Website Portal Satu Data Basarnas										Analisa Kebutuhan program aplikasi	Ujicoba Rancangan Layanan Akses data			Jumlah SDM TI yang tersertifikasi
											Deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan perangkat TI end user yang dtindaklanjuti	Pemasangan kabel untuk infrastruktur TI			
												Pemantauan (Monitoring) Jaringan			
												Ujicoba Sistem Jaringan Komputer lokal (LAN)			
												Pemasangan perangkat fisik TI			
												Pemantauan (Monitoring) Kinerja Infrastruktur TI			

Indikator Kinerja													
Kepala Pusat Data dan Informasi	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data			Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas			Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel		Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas
Rencana Kinerja													
Pranata Komputer Terampil			Sinkronisasi Data Operasi SAR terlaksana tepat waktu		Menyediakan dokumen atas permintaan informasi melalui website/ mobile PPID					Pemasangan perangkat infrastruktur TI	Pembuatan Desain grafis		Jumlah SDM TI yang tersertifikasi
			Tersedianya infografis operasi pencarian dan pertolongan dalam bentuk ebook		Konten website PPID termutakhirkan secara berkala					Pemantauan dan ujicoba jaringan	Dukungan teknologi informasi dalam kegiatan latihan SAR		
					Menyediakan data dukung penilaian KIP					Pemantauan kinerja infrastruktur			
					Menyediakan Informasi Statistik (dalam bentuk Brosur atau Buku Infografis dan Buku Statistik)								

SP.9 Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



SP.9 Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



Manual Indikator Kinerja (JPT Pusat Data dan Informasi)

INDIKATOR KINERJA 1.1			
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i>		
Rencana Kinerja :	Tersedianya data dan informasi yang akurat		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, sehingga diharapkan Basarnas memiliki data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar K/L untuk mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Mengukur persentase pemenuhan data berdasarkan hasil kesepakatan forum satu data yang akan dikumpulkan pada tahun berjalan untuk penyajian dalam bentuk buku statistik dan buku infografis.		
	Formula		
	$A \% = \frac{\text{Jumlah Data yang terealisasi berdasarkan hasil kesepakatan}}{\text{Jumlah data yang disepakati dalam forum satu data}} * 100$ $B \% = \frac{\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yang teralisasi}}{\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yang diterbitkan per tahun}} * 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2} * 100$		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan		
	Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar K/L.		
Satuan Pengukuran:	Persentase		
Jenis Indikator Kinerja:	<input type="checkbox"/> Outcome <input checked="" type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali sedang		
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		
Sumber Data:	Data operasi pencarian dan pertolongan, data latihan pencarian dan pertolongan, data sarana SAR, data alat komunikasi, data pendidikan dan pelatihan tenaga, data pelatihan potensi, data koordinasi, data sertifikasi, data masyarakat, data kepegawaian dan produk hukum, data anggaran, data humas, data ratsip, data BMN, MOU (dalam dan luar negeri).		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan <i>(diisi periode pelaporan data)</i>

INDIKATOR KINERJA 1.2			
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i>		
Rencana Kinerja :	Tersedianya data dan informasi yang akurat		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat		

Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Basarnas (operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan potensi SAR, registrasi radio beacon) melalui survei dengan hasil nilai indeks.			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas yang terealisasi}}{\text{Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas dalam tahun berjalan}} * 100$			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan			
	Mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan operasi pencarian dan pertolongan, registrasi radio beacon, dan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persentase			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome		<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Responden			
Sumber Data:	Data Survei Kepuasan Masyarakat			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan (diisi periode pelaporan data)

INDIKATOR KINERJA 1.3			
Perspektif* :	(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)		
Rencana Kinerja :	Tersedianya data dan informasi yang akurat		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		
Indikator Kinerja Individu:	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi dilakukan untuk mengetahui ketaatan dan kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.		
	Formula		
	<p>Berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluator Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat, dengan kategori nilai Skor pemeringkatan keterbukaan informasi publik sebagai berikut:</p> <p>Skor 97-100 = INFORMATIF Skor 80-96 = Menuju INFORMATIF Skor 60-79 = Cukup INFORMATIF Skor 40-59 = Kurang INFORMATIF Skor < 39 = Tidak INFORMATIF</p>		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan		
	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.		
Satuan Pengukuran:	Skor Keterbukaan Informasi Publik		

Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggu jawab IK:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	Permohonan informasi, Dokumen pemenuhan pada penilaian skor KIP (43 dokumen).			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan <i>(diisi periode pelaporan data)</i>

INDIKATOR KINERJA 1.4

Perspektif* :	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berpedoman pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah.			
	Formula			
	Berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluator Eksternal dari Kementerian PANRB, dengan predikat penilaian: Memuaskan : 4.2 - 5.0 Sangat Baik : 3.5 - < 4.2 Baik : 2.6 - <3.5 Cukup : 1.8 - < 2.6 Kurang : < 1.8			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan			
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.			
Satuan Pengukuran:	Nilai Indeks SPBE			

Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggu jawab IK:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Sumber Data:	Dokumen pemenuhan pada penilaian Indeks SPBE (rencana aksi, kebijakan, dll).			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan <i>(diisi periode pelaporan data)</i>

INDIKATOR KINERJA 1.5

Perspektif* :	<i>(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan			

Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengetahui kesiapan aplikasi dan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional.		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional.		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Mengukur persentase kesiapan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi selama setahun dalam mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik		
	Formula		
	$A \% = \frac{(\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime aplikasi})}{(365 \text{ hari} * 24 \text{ jam})} * 100$ $B \% = \frac{(\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime infrastruktur})}{(365 \text{ hari} * 24 \text{ jam})} * 100$ $C \% = \frac{(\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime internet})}{(365 \text{ hari} * 24 \text{ jam})} * 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\% + \sum C\%)}{3} * 100$		
Tujuan			
Meningkatkan pelayanan kepada pengguna aplikasi dan infrastruktur dalam menjalankan kegiatan operasional.			
Satuan Pengukuran:	Persentase		
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi		
Sumber Data:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi		
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan (diisi periode pelaporan data)
INDIKATOR KINERJA 1.6			
Perspektif* :	(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengetahui pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Mengetahui jumlah dukungan bidang teknologi informasi yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi		
	Formula		
	$\% = \frac{(\text{jumlah pelaksanaan dukungan teknologi informasi dalam setahun})}{(\text{total kegiatan Basarnas terkait dukungan TI yang direncanakan dalam setahun})} * 100$		
Tujuan			
Mengukur tingkat dukungan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional			
Satuan Pengukuran:	Persentase		

Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggu jawab IK:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi			
Sumber Data:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan (diisi periode pelaporan data)

INDIKATOR KINERJA 1.7

Perspektif* :	(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Berpedoman pada Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur persentase pelaksanaan ketatausahaan selama 1 (satu) tahun			
	Formula			
	$A \% = \frac{(\text{jumlah realisasi penyerapan anggaran})}{\text{jumlah anggaran yang diterima}} * 100$ $B \% = \frac{(\text{jumlah penggunaan arsip})}{\text{jumlah berkas}} * 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2} * 100$			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Tujuan			
	Menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Pusat Data dan Informasi			
Satuan Pengukuran:	Persentase			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggu jawab IK:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi			
Sumber Data:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan (diisi periode pelaporan data)

INDIKATOR KINERJA 1.8

Perspektif* :	(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin			

Deskripsi Rencana Kinerja:	Mengukur persentase pemenuhan kompetensi SDM yang tersertifikasi			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengetahui sumber daya manusia yang memiliki kompetensi bidang teknologi informasi			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah SDM yang tersertifikasi}}{\text{Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi tahun berjalan}} * 100$			
Tujuan	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi			
Satuan Pengukuran:	<i>Persentase</i>			
Jenis Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Outcome	<input type="checkbox"/> Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi			
Sumber Data:	Pusat Data dan Informasi/ Kepala Pusat Data dan Informasi			
Periode Pelaporan:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan (<i>diisi periode pelaporan data</i>)

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PUSAT DATA DAN INFORMASI**

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	Tersedianya data dan informasi yang akurat	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	100%	Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan Pengelolaan Data dan Statistik SAR
		Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	100%	Pengelolaan Survey Kepuasan Layanan Basarnas
		Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	80 (Menuju Informatif)	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Basarnas
2	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	2,6 (Baik)	Pengelolaan SPBE
		Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	98%	Maintenance IT System Support
				Operasional Jaringan IT
				Pemeliharaan Data Maritim
				Pembayaran Lisensi Aplikasi
Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	70%	Langganan Operasional Domain Basarnas		
		IT Technical Support		
		Pengembangan Visualisasi Kolaborasi Streaming		
3	Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	85%	Pengelolaan Anggaran dan Kearsipan
		Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	85%	Pembinaan Kompetensi SDM TI

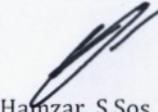
Jakarta, Februari 2022
Kepala Pusat Data dan Informasi


Didi Hamzar, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT DATA DAN INFORMASI

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN SESUAI POK	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1 Tersedianya data dan informasi yang akurat	1 Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	1 Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
		2 Pengelolaan Data dan Statistik SAR			
	2 Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	3 Pengelolaan Survey Kepuasan Layanan Basarnas	100%	91,67%	92%
	3 Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	4 Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Basarnas	80	89,37	112%
2 Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan	4 Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	5 Pengelolaan SPBE	2,6	2,85	110%
	5 Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	6 Maintenance IT System Support	98%	84,11%	86%
		7 Operasional Jaringan IT			
		8 Pemeliharaan Data Maritim			
		9 Pembayaran Lisensi Aplikasi			
	6 Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	10 Langganan Operasional Domain Basarnas	70%	98%	140%
		11 IT Technical Support			
		12 Pengembangan Visualisasi Kolaborasi Streaming			
			13 Pengembangan Aplikasi Manajemen Informasi		
3 Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin	7 Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	14 Pengelolaan Anggaran dan Kearsipan	85%	89,73%	106%
	Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	15 Pembinaan Kompetensi SDM TI	85%	100%	118%

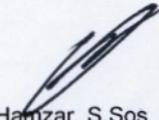
Jakarta, ~~22~~ Februari 2023
Kepala Pusat Data dan Informasi


Didi Hamzar, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)

**REALISASI ANGGARAN PUSAT DATA DAN INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Keterangan	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI ANGGARAN	%
1	Tersedianya data dan informasi yang akurat	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan	147.300.000	87.781.000	86.548.050	98,60%
			Pengelolaan Data dan Statistik SAR	200.000.000	150.000.000	149.731.501	99,82%
		Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	Pengelolaan Survey Kepuasan Layanan Basarnas	302.700.000	102.700.000	102.113.203	99,43%
		Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Basarnas	300.000.000	180.000.000	174.460.609	96,92%
2	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Pengelolaan SPBE	150.000.000	64.400.000	39.158.384	60,80%
		Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	Maintenance IT System Support	9.071.783.000	9.071.783.000	8.925.884.357	98,39%
			Operasional Jaringan IT	1.846.976.000	1.846.976.000	1.830.995.788	99,13%
			Pemeliharaan Data Maritim	3.000.000.000	3.000.000.000	2.953.932.000	98,46%
			Pembayaran Lisensi Aplikasi	2.079.041.000	2.079.041.000	2.076.285.207	99,87%
			Langganan Operasional Domain Basarnas	110.000.000	110.000.000	108.901.000	99,00%
		Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	IT Technical Support	400.000.000	252.000.000	193.538.962	76,80%
			Pengembangan Visualisasi Kolaborasi Streaming	1.563.092.000	1.563.092.000	1.563.091.200	100%
	Pengembangan Aplikasi Manajemen Informasi	2.353.560.000	2.353.560.000	2.353.560.000	100%		
3	Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	Pengelolaan Anggaran dan Kearsipan	50.000.000	50.000.000	49.969.050	99,94%
		Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	Pembinaan Kompetensi SDM TI	250.000.000	250.000.000	245.324.000	98,13%
TOTAL				21.824.452.000	21.161.333.000	20.853.493.311	98,55%

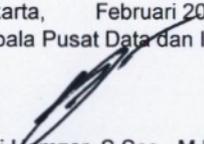
Jakarta, Desember 2022
Kepala Pusat Data dan Informasi


Didi Hamzar, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)

RENCANA AKSI PENCAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI TAHUN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI
1	Tersedianya data dan informasi yang akurat	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	100%	Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan	1 Dok	Kepala Pusdatin	Pusdatin	Januari s.d. Desember	Jakarta
				Pengelolaan Data dan Statistik SAR	1 Dok	Kepala Pusdatin	Pusdatin	Jan s.d. Des	Jakarta
		Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	100%	Pengelolaan Survey Kepuasan Layanan Basarnas	1 Dok	Kepala Pusdatin	Pusdatin	Januari s.d. Desember	Jakarta
		Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	80 (Menuju Informatif)	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Basarnas	1 Dok	Kepala Pusdatin	Pusdatin	Januari s.d. Desember	Jakarta
2	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	2,6 (Baik)	Pengelolaan SPBE	1 Dok	Kepala Pusdatin	Pusdatin	Januari s.d. Desember	Jakarta
		Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	98%	Maintenance IT System Support	1 Dok	Kepala Pusdatin	Pusdatin	Jan s.d. Des	Jakarta
				Operasional Jaringan IT	1 Dok	Kepala Pusdatin	Pusdatin	Jan s.d. Des	Jakarta
				Pemeliharaan Data Maritim	1 Dok	Kepala Pusdatin	Pusdatin	Jan s.d. Des	Jakarta
				Pembayaran Lisensi Aplikasi	1 Dok	Kepala Pusdatin	Pusdatin	Jan s.d. Des	Jakarta
				Langganan Operasional Domain Basarnas	1 Dok	Kepala Pusdatin	Pusdatin	Januari s.d. Desember	Jakarta
		Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	70%	IT Technical Support	1 Dok	Kepala Pusdatin	Pusdatin	Jan s.d. Des	Jakarta
				Pengembangan Visualisasi Kolaborasi Streaming	1 Dok	Kepala Pusdatin	Pusdatin	Jan s.d. Feb	Jakarta
				Pengembangan Aplikasi Manajemen Informasi	1 Dok	Kepala Pusdatin	Pusdatin	Jan s.d. Feb	Jakarta
		3	Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	85%	Pengelolaan Anggaran dan Kearsipan	1 Dok	Kepala Pusdatin	Pusdatin
Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	85%			Pembinaan Kompetensi SDM TI	1 Dok	Kepala Pusdatin	Pusdatin	Januari s.d. Desember	Jakarta

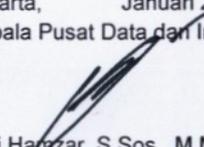
Jakarta, Februari 2022
Kepala Pusat Data dan Informasi


Didi Hamzar, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)

PEMANTAUAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI TAHUN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN TRIWULAN				KET
						I	II	III	IV	
1	Tersedianya data dan informasi yang akurat	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	100%	Forum Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan	1 Dok	-	-	-	86.548.050	Automatic Adjustment Belanja sebesar Rp. 59.519.000
				Pengelolaan Data dan Statistik SAR	1 Dok	-	118.130.251	2.880.000	28.721.250	Automatic Adjustment Belanja sebesar Rp. 50.000.000
		Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	100%	Pengelolaan Survey Kepuasan Layanan Basarnas	1 Dok	-	52.457.637	-	49.655.566	Automatic Adjustment Belanja sebesar Rp. 200.000.000
		Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Basarnas	1 Dok	-	15.000.000	-	159.460.609	Automatic Adjustment Belanja sebesar Rp. 120.000.000
2	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	Baik (2,6)	Pengelolaan SPBE	1 Dok	-	7.200.000	-	31.958.384	Automatic Adjustment Belanja sebesar Rp. 85.600.000
		Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	98%	Maintenance IT System Support	1 Dok	339.680.000	1.067.880.566	3.401.249.954	4.117.073.837	
				Operasional Jaringan IT	1 Dok	902.351.609	9.590.035	10.823.839	908.230.305	
				Pemeliharaan Data Maritim	1 Dok	2.950.662.000	-	3.270.000	-	
				Pembayaran Lisensi Aplikasi	1 Dok	12.890.098	659.031.234	1.211.652.569	192.711.306	
				Langganan Operasional Domain Basarnas	1 Dok	-	41.625.000	42.301.000	24.975.000	
		Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	70%	IT Technical Support	1 Dok	-	10.874.500	56.059.438	126.605.024	Automatic Adjustment Belanja sebesar Rp. 148.000.000
				Pengembangan Visualisasi Kolaborasi Streaming	1 Paket	1.563.091.200	-	-	-	
				Pengembangan Aplikasi Manajemen Informasi	1 Paket	2.353.560.000	-	-	-	
3	Meningkatnya kualitas ketatausahaan dan SDM Pusdatin	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	85%	Pengelolaan Anggaran dan Kearsipan	1 Dok	19.050.000	-	-	30.919.050	
		Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	85%	Pembinaan Kompetensi SDM TI	1 Dok	-	2.900.000	-	242.424.000	
TOTAL						8.141.284.907	1.984.689.223	4.728.236.800	5.999.282.381	

Jakarta, Januari 2023
Kepala Pusat Data dan Informasi


Didi Hamzar, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)